



LAPORAN KINERJA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2022



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja sesuai dengan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diukur dari indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah mencurahkan kemampuan, gagasan, dan upaya terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan Kinerja ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya terkait peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. DYDIK RUDY PRASETYA, M.MA

Pembina Tingkat I
NIP. 19690308 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

I.PENDAHULUAN.....1

 A.Struktur Organisasi..... 1

 B.Tugas dan Fungsi..... 2

 C.Isu Strategis 2

 D.Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD) 4

 E.Peta Proses Bisnis 6

 F.Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi..... 6

II.PERENCANAAN KINERJA.....8

 A.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 8

 B.Strategi dan Arah kebijakan 10

 C.Perjanjian Kinerja 10

III.AKUNTABILITAS KINERJA13

 A. Capaian Kinerja Organisasi..... 13

 B.Realisasi Anggaran 32

 C.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 35

IV.PENUTUP37

V.LAMPIRAN38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-20249

Tabel 2. Strategi dan Arah kebijakan Untuk Mencapai Sasaran Dalam Perubahan Renstra Diperta KP 2019-2024.....10

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 202211

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.12

Tabel 5. Nilai realisasi indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur Tahun 202213

Tabel 6. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.....14

Tabel 7. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra15

Tabel 8. Daerah Rentan Rawan Pangan di Jawa Timur16

Tabel 10. Nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas di Provinsi Jawa Timur Tahun 202219

Tabel 11. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-202219

Tabel 12. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra.....20

Tabel 13. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas21

Tabel 14. Nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Tahun 202222

Tabel 15. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Tahun 2020-2022.....23

Tabel 16. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra24

Tabel 17. Tingkat efisiensi Sasaran Strategis Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman27

Tabel 18. Nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022.....28

Tabel 19. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020-202229

Tabel 20. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra ..29

Tabel 21. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan31

Tabel 22. Penganggaran dan Realisasi APBD oleh BLUD sd 31 Desember 202232

Tabel 23. Penganggaran dan Realisasi APBN oleh BLUD sd 31 Desember
202234

DAFTAR GAMBAR

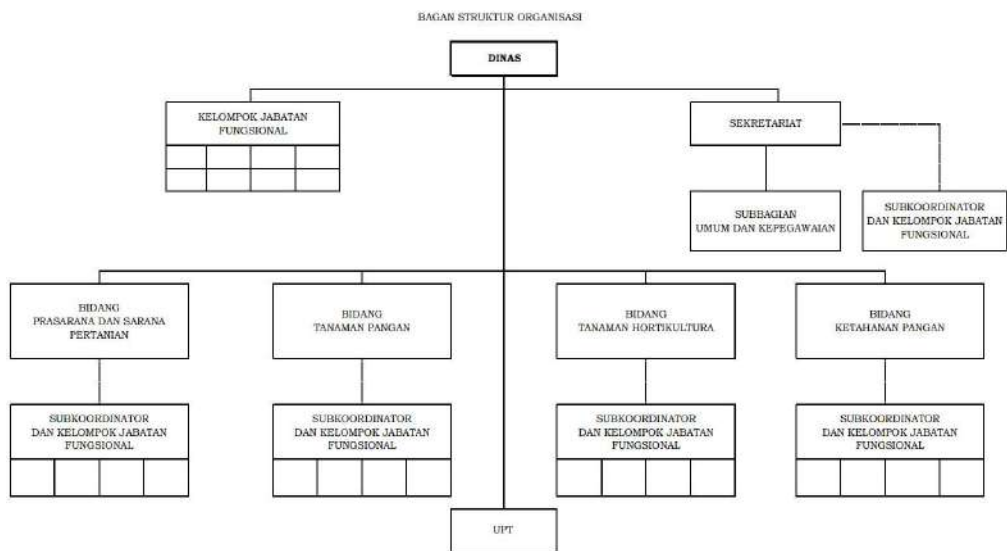
Gambar 1. Struktur Organisasi1
Gambar 2. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan.....4
Gambar 3. Sasaran 2: Meningkatnya produksi tanaman pangan dan
hortikultura prioritas.....4
Gambar 4. Sasaran 3: Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada
tanaman5
Gambar 5. Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan5
Gambar 6. Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur6

I. PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas,
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. UPT
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor : 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dan pangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

Isu tentang pangan merupakan isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam Nawa Bhakti Satya ke 6, yaitu Jatim Agro. Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok yang utama bagi masyarakat. Ketahanan pangan yang meningkat akan berpengaruh terhadap bidang lainnya seperti bidang ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

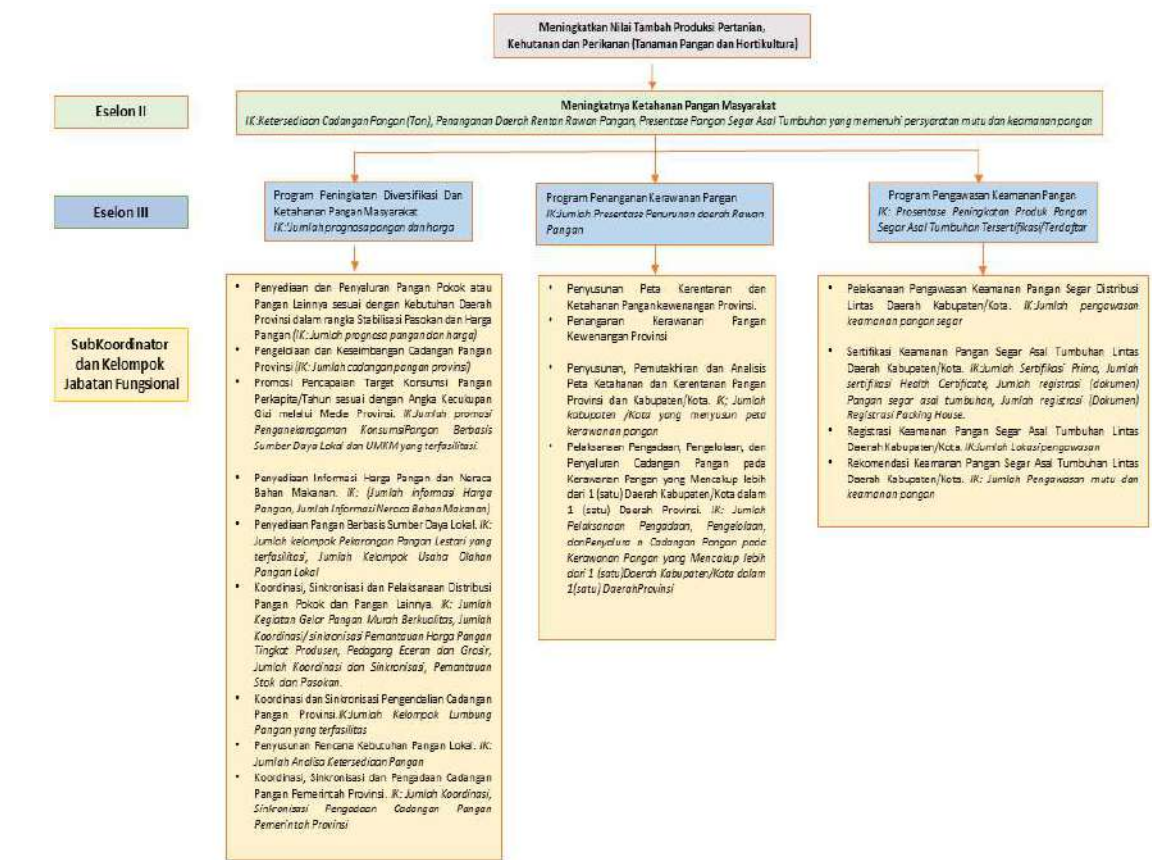
Namun Isu pangan tersebut tidak terlepas dari isu perubahan iklim global. Perubahan iklim global sekarang ini akibat dari aktivitas manusia dan

pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Kebiasaan berusaha petani yang menggantungkan sepenuhnya penggunaan pupuk anorganik dan dalam jangka panjang selain berakibat pada penurunan kandungan bahan organik tanah juga menjadi salah satu kontributor peningkatan emisi gas rumah kaca dan menimbulkan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pertanian adalah presipitasi. Pola distribusi temporal dan spatial curah hujan tidak normal. Demikian pula intensitasnya yang kadang-kadang sangat ekstrim. Awal dan durasi musim hujan atau kemarau tidak teratur dan kadang kala bergeser. Frekuensi dan intensitas badai juga meningkat yang mengakibatkan banjir atau kekeringan sering terjadi dan cenderung sulit diprediksi.

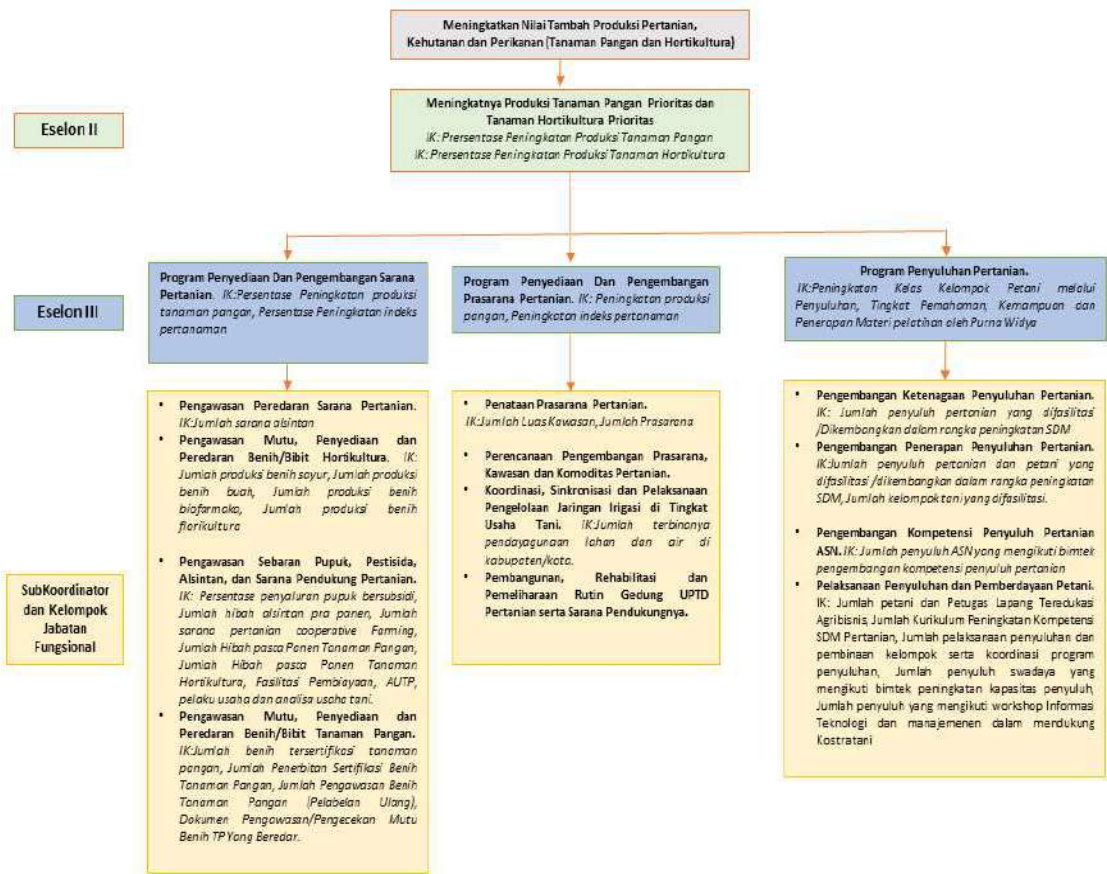
Di era perubahan iklim ini, posisi sektor pertanian sangat strategis karena peran vital sektor pertanian dalam penyediaan pangan dan bahan baku industri pengolahan dibandingkan sektor lainnya. Ketahanan pangan tidak akan tercapai jika produktivitas dan luas panen turun dampak dari perubahan iklim tersebut. Sehingga Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur masih menghadapi permasalahan mendasar terkait isu pangan dan isu perubahan iklim, yaitu:

- a. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pra panen pertanian;
- b. Belum optimalnya tingkat produksi dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Berkurangnya lahan subur dan meningkatnya gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- d. Masih belum optimalnya penggunaan benih hortikultura yang bersertifikat oleh petani;
- e. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar , permodalan dan perlindungan usahatani;
- f. Kurangnya komitmen pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- g. Masih lemahnya kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Masih adanya daerah rentan pangan di Jawa Timur

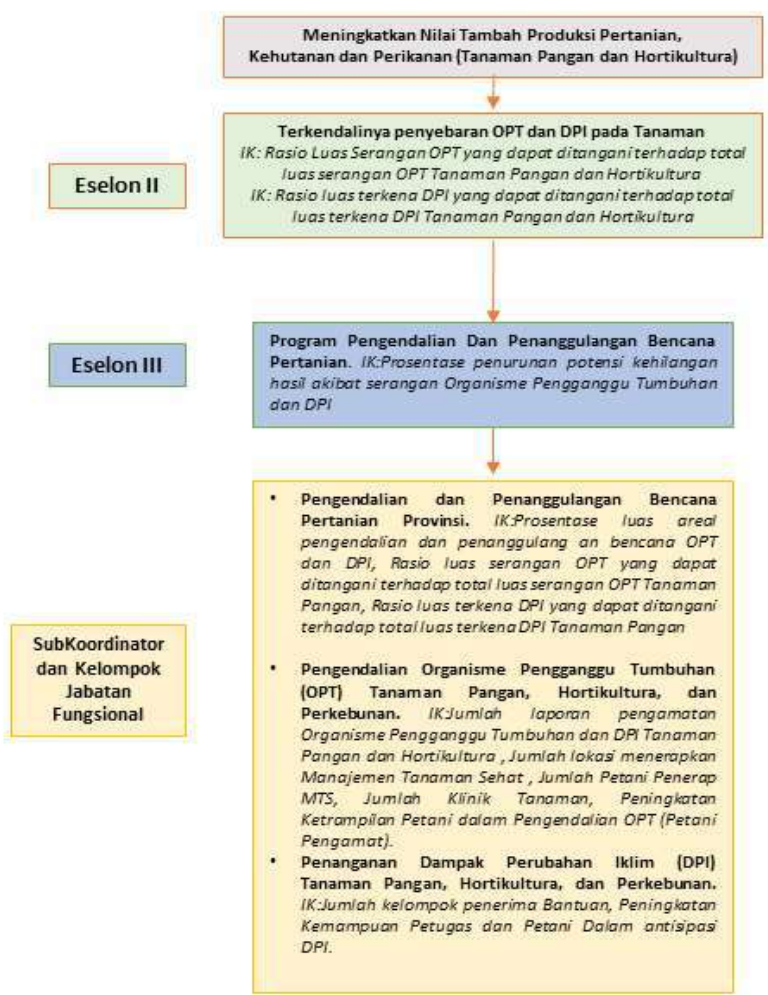
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)



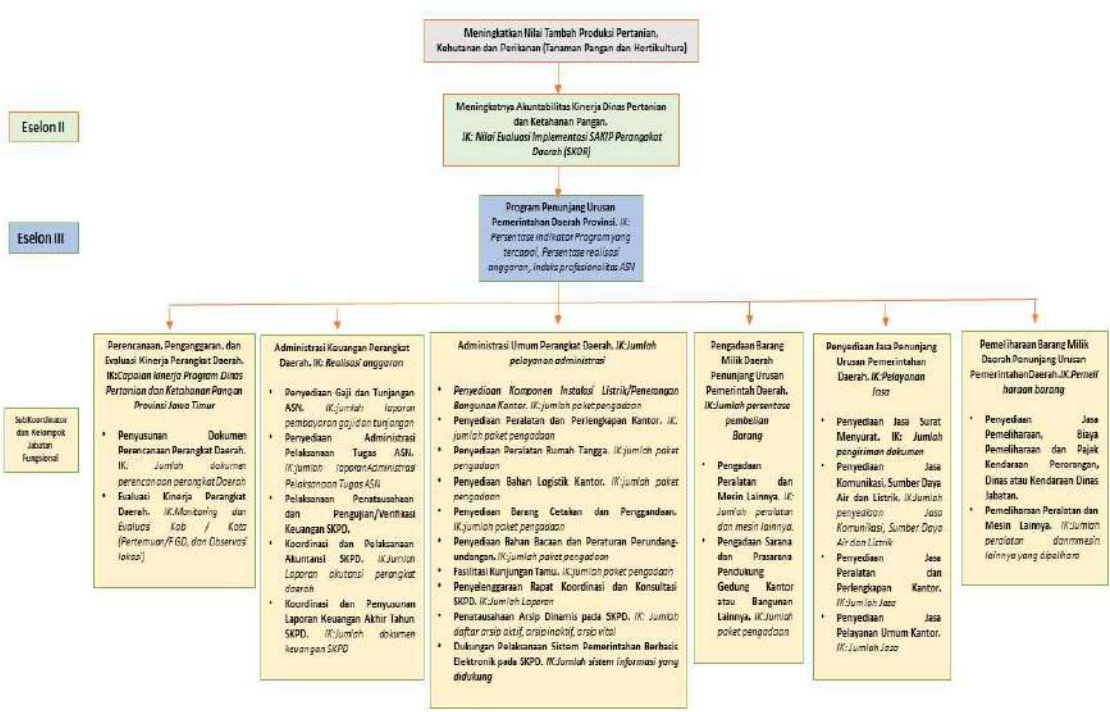
Gambar 2. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan



Gambar 3. Sasaran 2: Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas

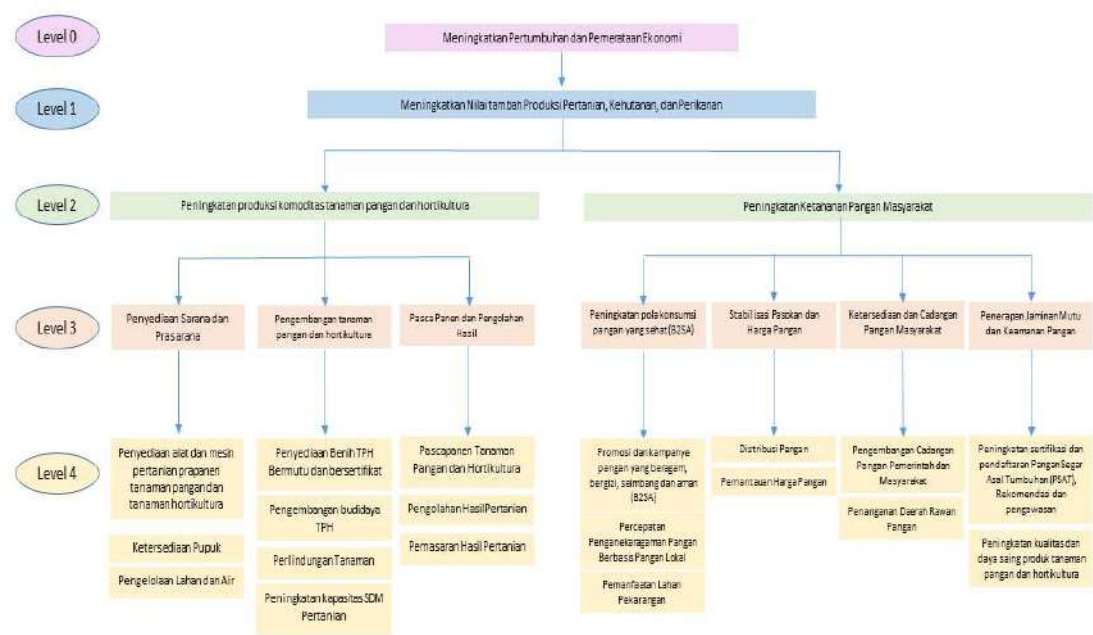


Gambar 4. Sasaran 3: Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman



Gambar 5. Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

E. Peta Proses Bisnis



Gambar 6. Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Uraian secara singkat atas hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja.
- 2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik yaitu belum dilengkapi dengan definisi operasional atas indikator kinerja serta target yang ditetapkan masih belum meansurable sehingga tidak memenuhi kriteria SMART
- 4) Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur belum menjelaskan informasi terkait dengan pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya peningkatan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas
- 2) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyusun definisi operasional atas setiap indikator yang digunakan serta menetapkan target yang “measurable” agar memenuhi kriteria SMART
- 3) Meningkatkan kualitas laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan melengkapi penjelasan terkait hambatan dalam pencapaian indikator kinerja
- 4) Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring pencapaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- 5) Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja
- 6) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja
- 7) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

II. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2022 merupakan keberlanjutan dari penerapan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang dilakukan sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menyesuaikan Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menggantikan Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran dapat terlihat jika ada ukuran dari keberhasilan atau ketidakberhasilan upaya pembangunan, yang dikenal dengan indikator kinerja pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan upaya mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Jawa Timur yang kemudian dijabarkan dan ditetapkan kedalam Tujuan, yaitu “Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan” dengan sasaran :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan Sasaran dan Indikator kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 yakni mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Perubahan RPJMD 2019-2024 dan analisis isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang tertuang pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Pertanian Tanaman Pangan	%	0,01	0,97-1,47	0,97-1,47
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Pertanian Tanaman Hortikultura	%	0,01	3,82-4,32	3,82-4,32
		Ketersediaan Beras	ton	5.629.343	5.650.000	5.670.000
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,9	90	91,1
	SASARAN RENSTRA					
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Cadangan Pangan(Ton)	ton	200	200	200
		Penanganan Daerah rentan rawan pangan	Klmpk	5	5	5
		Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	96,0	120,0	150,0
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas dan Hortikultura Prioritas	Prersentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	1,5	2,0	2,5
		Prersentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	1,0	1,0	1,0
3	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	%	78	80	80
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Hortikultura	%	78	80	80
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	%	62	64	65
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Hortikultura	%	62	64	65
4	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan KetahananPangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (SKOR)	Skor	82,75	82,75	82,75

B. Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan target yang ada pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024 . Diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Strategi dan Arah kebijakan Untuk Mencapai Sasaran Dalam Perubahan Renstra Diperta KP 2019-2024

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Peningkatan Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi Pangan Beragam Gizi Seimbang dan Aman (B2SA)
2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas	2. Peningkatan Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	2. Meningkatkan Pemanfaatan Pekarangan untuk penyediaan Konsumsi pangan Tingkat Rumah Tangga sekaligus Peningkata Pendapatan
3. Meningkatnya Produksi Hortikultura Prioritas	3. Peningkatan Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	3. Meningkatkan Pengawasan PSAT pre market dan post market untuk menjamin peredaran pangan yang aman dikonsumsi
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	4. Optimalisasi sarana pertanian termasuk sarana produksi	4. Meningkatkan Ketersediaan sarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, alsintan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
	5. Penurunan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta bencana banjir dan kekeringan	5. Penyediaan infrastruktur pertanian dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura
	6. Peningkatan daya saing petanian/ kelompok tani serta kelembagaan	6. Optimalisasi Pengamanan dan Perlindungan Tanaman
	7. Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesekretariatan	7. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian
		8. Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP melalui Peencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian Kinerja yang akuntabel

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai Target yang terdapat pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021, untuk mencapai sasaran strategis, maka ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun tersebut. Capaian kinerja pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Jawa Timur di Tahun 2022 merupakan implementasi

dari seluruh program/kegiatan. Keberhasilan capaian kinerja pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dengan berdasarkan Indikator Kinerja serta Target Tahunan yang menjadi Perjanjian Kinerja selama tahun 2022 serta selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang diampu. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Prespektif
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan Cadangan Pangan	200 ton	Penerima Layanan
		Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	5 klmpk	Penerima Layanan
		Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96%	Penerima Layanan
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	1,5%	Penerima Layanan
		Presentase peningkatan produksi hortikultura	1,0%	Penerima Layanan
3.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	78%	Penerima Layanan
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura	78%	Penerima Layanan
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	62%	Penerima Layanan
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura	62%	Penerima Layanan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82,75	Penguatan Internal, Anggaran

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan Program/Kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 222.399.566.553	P-APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 11.353.350.000	P-APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 175.000.000	P-APBD
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 1.114.627.750	P-APBD
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 27.488.533.695	P-APBD
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 7.425.001.434	P-APBD
7.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 9.538.063.017	P-APBD
8.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.247.696.249	P-APBD
	Total	Rp. 281.741.838.698	P-APBD
9.	a. Dana Dekonsentrasi	Rp. 39.372.374.000	APBN
	b. Dana Tugas Pembantuan	Rp. 114.719.316.000	APBN
	Total	Rp. 154.091.690.000	APBN

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja, pelaksanaan agenda prioritas anggaran, kinerja lainnya yang dicerminkan dalam inovasi dan berbagai penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja. Penjelasan setiap capaian Indikator Kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut. Capaian sasaran pertama yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat. Capaian Kinerja pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.

Tabel 5. Nilai realisasi indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan Cadangan Pangan	Penerima Layanan	ton	200	134,51	68%
		Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Penerima Layanan	kelompok	5	30	600%
		Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Penerima Layanan	%	96	90,68	94,45%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Pada Tahun 2022, Ketersediaan Cadangan pangan adalah sebesar 134,51 ton atau 68 % dari target tahun 2022 yakni 200 ton. Untuk indikator kinerja Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan terealisasi untuk 30 kelompok dari target tahun 2022 yakni 5 kelompok atau dengan ketercapaian sebesar 600 %. Sedangkan untuk indikator Presentase Pangan segar asal

tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan tercapai sebesar 90,68% dari target tahun 2022 yakni 96 % atau presentase ketercapaian sebesar 94,45%.

Tabel 6. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan Cadangan Pangan	Penerima Layanan	ton	138,54	135,64	134,51
		Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Penerima Layanan	kelompok	20	5	30
		Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Penerima Layanan	%	436	264,88	90,68

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Realisasi Ketersediaan Cadangan Pangan Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 135,64 ton menurun -0,85% Sedangkan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 138,54 ton , menurun -3,00%. Untuk realisasi Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan pada Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 5 kelompok terjadi peningkatan 83,33 %. Sedangkan dibandingkan dengan Tahun 2020 hanya terjadi peningkatan 33,33%. Terakhir, untuk indikator Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 menurun -192,10% begitu juga dibandingkan dengan Tahun 2020 turun sebesar -380,81 %.

Tabel 7. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Kemajuan
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan Cadangan Pangan	Penerima Layanan	ton	200	134,51	68%
		Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Penerima Layanan	kelompok	5	30	600%
		Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Penerima Layanan	%	150	90,68	60%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Untuk realisasi Ketersediaan Cadangan Pangan Tahun 2022 terhadap Target akhir renstra sebesar 200 ton masih mencapai kemajuan 68%. Sedangkan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan sudah melebihi target akhir Renstra yakni 600%. Terakhir, untuk indikator Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Tahun 2022 mencapai 60% terhadap target akhir Renstra.

. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Penyebab tidak tercapainya target tahun 2022 dari indikator Ketersediaan Cadangan pangan karena adanya ketidaksesuaian MOU dengan Bulog, sehingga terjadi penyesuaian harga yang semula CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) setara dengan 135,64 Ton per Desember 2021 berubah menjadi 134,51 ton pada tahun 2022. Faktor yang menimbulkan peningkatan harga tersebut antara lain jumlah pasokan yang berkurang dari sentra produksi, sistem distribusi yang membentuk pasar oligopsoni dan jumlah cadangan pangan baik di pemerintah (pusat dan daerah) maupun di masyarakat. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan lumbung pangan di tingkat desa karena berfungsi sebagai penyedia pangan, depo logistik tingkat desa, cadangan pangan

dalam rangka mengantisipasi daerah rawan pangan secara berkesinambungan dengan memberikan bantuan sosial untuk modal usaha pengisian bahan pangan sekaligus untuk penunjang ketahanan pangan di Jawa Timur.

Untuk Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan keberhasilannya mencapai 600 %. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari program prioritas Gubernur dalam pengetaasan kemiskinan, yang kebetulan program pengetasan kemiskinan tersebut berada di kawasan daerah rentan rawan pangan. Daerah tersebut diantaranya :

Tabel 8. Daerah Rentan Rawan Pangan di Jawa Timur

Kabupaten	Desa/Kecamatan	
Bojonegoro	Desa Tapelan, Kecamatan Ngaho Desa Jumok, Kecamatan Ngaho Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo Desa Bareng, Kecamatan Sekar Desa Bobol, Kecamatan Sekar Desa Sumberejo, Kecamatan Margomulyo	Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem Desa Megale, Kecamatan Kedungadem
Sumenep	Desa Legung barat, Kecamatan Batang-batang Desa Nyamakan Timur, Kecamatan Batang-batang Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan Desa Sentol Daya, Kecamatan Pragaan Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto	Desa Larangan Burna, Kecamatan Batuputih Desa Bullaan, Kecamatan Batuputih Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng
Lamongan	Desa Karangkembang, Kecamatan Babat Desa Gedongkulon, Kecamatan Babat Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio Desa Bedingin, Kecamatan Sugio Desa Candisari, Kecamatan Sambeng Desa Pataan, Kecamatan Sambeng	Desa Tlanak, Kecamatan Kedungpring Desa Kradenanrejo, Kecamatan Kedungpring Desa Sidodowo, Kecamatan Modo Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo
Probolinggo	Desa Betek, Kecamatan Krucil Desa Krucil, Kecamatan Krucil Desa Jurangjero, Kecamatan Gading Desa Wangkal, Kecamatan Gading Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran Desa Gunggungan Kidul, Kecamatan Pakuniran	Desa Wonorejo, Kecamatan Maron Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron Desa Tongaskulon, Kecamatan Tongas Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas
Bangkalan	Desa Mandung kec Kokop Desa Durjan Kec Kokop Desa Bates Kec Blega Desa Alas Rajah, Kec Blega Desa Lerpak Kec Geger	Desa Katol Barat Kec Geger Desa Durin Timur, Kec Konang Desa Genteng, Kec Konang Desa Brekaas Degeh, Kec Modung Desa Alas kokon, Kec Modung
Lumajang	Desa Senduro Kec Senduro Desa Bedayu talang , Kec Senduro Desa Candipuro, kec Candipuro Desa Sumberwuluh, Kec Candipuro Desa Pasirian, Kec Pasirian Desa Kalibendo, Kec Pasirian	Desa Sukorejo, Kec Pasrujambe Desa Jambekumbu , Kec Pasrujambe Desa Yosowilangun Lor, Kec Yosowilangun Desa Darungan, Kec Yosowilangun

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Sedangkan capaian presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan tidak memenuhi target Tahun 2022 karena disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- a. Usaha Agroindustri rempah terutama pala merupakan produk lintas provinsi, dimana sektor hulu produsen rempah pala berada di wilayah Indonesia Timur. Pelaku usaha Jawa Timur bertindak sebagai industri hilir yang telah menerapkan standar sesuai peraturan pemerintah dan peraturan dari negara EU. Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu keluar ekspor pala dari Indonesia Timur
- b. Pendaftaran Nomor Ijin Edar PSAT
Pelaku usaha belum mampu menerapkan standar aturan dengan benarbahan baku yang di dapatkan , berupa produk dari pihak ketiga yang tidak diketahui asal usulnya
- c. Sertifikasi Prima
Petani masih belum mampu menerapkan standar pertanian GAP dengan benar

Dari kendala ketercapaian indikator kinerja Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dapat diatasi dengan berbagai alternatif solusi diantaranya:

- a. Penguatan monitoring evaluasi bagi pelaku usaha rempah dalam penerapan standar acuan yang telah ditetapkan pemerintah
- b. Melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha dalam menerapkan standar sanitasi hygien sebagai acuan
- c. Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha dan koordinasi antar stake holder yang terkait

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 9. Tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan Cadangan Pangan	68%	99,45%	31,45%
		Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	600%	97,17%	502,83%
		Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	94,95%	97,89%	2,94%

Pengukuran efisiensi suatu organisasi pada intinya adalah berusaha menganalisa hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dari indikator Ketersediaan Cadangan Pangan nilai capaian efisiensi 31,45% karena capaian kinerja yang dihasilkan 68% dari penyerapan anggaran 99,45%. Untuk Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan mencapai tingkat efisiensi 502,83% karena capaian kinerja melebihi target yakni 600% dengan penyerapan anggaran 97,17%. Sedangkan untuk Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hanya mencapai tingkat efisiensi 2,94% dengan capaian kinerja 94,95% dari penyerapan anggaran 97,89%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

Peningkatan capaian indikator sasaran Ketersediaan Cadangan Pangan tidak tercapai karena dana anggaran dialokasikan kedalam kegiatan lain dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan melalui kegiatan: Fasilitasi Kelompok Lumbung Pangan, Apresiasi Lumbung Pangan Masyarakat, Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat, Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, Analisa Ketersediaan Pangan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi.

Untuk capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan dicapai dengan berbagai kegiatan diantaranya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Sedangkan untuk capaian Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Tahun 2022 didukung oleh kegiatan diantaranya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas

Tabel 10. Nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Prioritas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	Penerima Layanan	%	1,5	1,57	104%
		Presentase peningkatan produksi hortikultura	Penerima Layanan	%	1	7,61	761%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Pada Tahun 2022 nilai capaian presentase peningkatan produksi tanaman pangan tercapai 1,57 % dari target yang ditetapkan yakni 1,5%. Untuk nilai capaian presentase peningkatan produksi tanaman hortikultura tercapai 7,61% .

Tabel 11. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	Penerima Layanan	%	2,88	27,55	1,57
		Presentase peningkatan produksi hortikultura	Penerima Layanan	%	8,62	17,18	7,61

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Perbandingan capaian presentase peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar -1658,79%. Sedangkan dibandingkan dengan Tahun 2020 menurun dengan presentase -83,86%. Untuk capaian presentase peningkatan produksi hortikultura pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar -125,78%, sedangkan dibanding dengan peningkatan presentase peningkatan produksi hortikultura pada tahun 2020 sebesar -13,28%.

Tabel 12. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Kemajuan
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	Penerima Layanan	%	2,5	1,57	63%
		Presentase peningkatan produksi hortikultura	Penerima Layanan	%	1	7,61	761%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Nilai capaian presentase peningkatan produksi tanaman pangaan dibandingkan dengan target akhir Resntra tercapai sebesar 63%. Sedangkan untuk capaian presentase peningkatan produksi hortikultura dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 761%.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Pada indikator presentase peningkatan produksi tanaman pangan mencapai target karena didukung oleh komoditas prioritas tanaman pangan dengan produksi yang tinggi. Komoditas prioritas yang menyumbang tingkat produksi pada tahun 2022 diantaranya, padi (9.682.187 ton)*, jagung (7.322.072 ton)*, kedelai (92.718 ton)*, kacang tanah (94.617 ton)*, kacang hijau (38.158)*, Ubi Kayu (1.452.068 Ton)*, Ubi Jalar (10.992 ton)*. Untuk indikator presentase peningkatan produksi hortikultura dapat melebihi target karena adanya Komoditas prioritas yang menyumbang tingkat produksi pada tahun 2022 diantaranya komoditas sayur dan buah. Sayur tersebut terdiri dari bawang merah (4.737.445 ton)*, Bawang Putih (8.545 ton)*, Cabai Keriting (307.493 ton)*. Sedangkan untuk komoditas buah tersebut adalah durian (3.373.763 ton)* , Jeruk Siam/ Keprok (11.600.279 ton)*, Mangga (12.644.064 ton)*, Nenas (3.221.100 ton)*, Pisang (25.058.149 ton)*, dan Salak (1.918.152 ton)*.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 13. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	104%	92,81%	11,9%
		Presentase peningkatan produksi hortikultura	761%	92,81%	668%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Tingkat Efisiensi indikator Presentase peningkatan produksi tanaman pangan 11,9% dengan presentase capaian kinerja sebesar 104% dari penyerapan anggaran 92,81%. Sedangkan tingkat efisiensi dari indikator presentase peningkatan produksi hortikultura 668%, dengan presentase capaian kinerja 761% dari penyerapan anggaran 92,81%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

Presentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura didukung dengan berbagai kegiatan diantaranya: Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, Penataan Prasarana Pertanian, Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

Sedangkan yang menjadikan kendala yakni program singkronisasi data tidak dapat dilakukan pada awal tahun berikutnya karena menunggu konsolidasi data dari pihak kecamatan ke pihak kabupaten kemudian di serahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

3. Sasaran Strategis Ketiga: Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman

Tabel 14. Nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	Penerima Layanan	%	78	99,16	127%
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura	Penerima Layanan	%	78	99,95	128%
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	Penerima Layanan	%	62	74,08	119%
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura	Penerima Layanan	%	62	57,68	93%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Capaian indikator Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan tercapai 127%. Untuk Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura tercapai 128 %. Sedangkan Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan tercapai 119%, Akan tetapi Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura hanya tercapai 93%.

Tabel 15. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Tahun 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
3.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	Penerima Layanan	%	98,19	99,76	99,16
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura	Penerima Layanan	%	99,87	99,88	99,95
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	Penerima Layanan	%	87,03	88,79	74,08
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura	Penerima Layanan	%	95,38	77,67	57,68

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Capaian indikator Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 meningkat 21,99%, dan di dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan 22,94,95%. Untuk Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 meningkat 22,01 % dan dibandingkan Tahun 2020 meningkat 22,07%. Sedangkan Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat 38% dan dibandingkan Tahun 2020 meningkat 27,16 %. Begitu juga Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 meningkat 38 %, akan tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2020 menurun sebesar -2,53%.

Tabel 16. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Kemajuan
3.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	Penerima Layanan	%	80	99,16	124%
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura	Penerima Layanan	%	80	99,95	125%
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	Penerima Layanan	%	65	74,08	114%
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura	Penerima Layanan	%	65	57,68	89%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Capaian indikator Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan Tahun 2022 mencapai 124% dibandingkan target akhir Renstra. Untuk Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura Tahun 2022 tercapai 125% dibandingkan dengan target akhir Renstra. Sedangkan Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan tahun 2022 mencapai 114% dibandingkan dengan target akhir Renstra. Begitu juga Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura Tahun 2022 sudah mencapai 89% dibandingkan target akhir Renstra

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Capaian indikator Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan tercapai 127% karena dari semua serangan OPT pada tanaman pangan telah diterapkan perlindungan tanaman dengan pengimplementasian PHT (Pengendalian Hama Terpadu) sehingga ketercapaian indikator melebihi target. Strategi PHT yang diterapkan adalah dengan upaya preventif untuk mencegah serangan OPT terjadi dan upaya responsif untuk mengendalikan OPT yang menyerang sedini mungkin agar tidak semakin berkembang sehingga menyebabkan kerugian secara ekonomis. Strategi yang dilakukan adalah Spot Stop dengan sistem PHT yaitu mengendalikan OPT pada sumber serangan yang ada dengan pendekatan agroekosistem setempat serta sosial budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) menjadikan penggunaan pestisida sebagai pilihan terakhir dan dilaksanakan secara tepat guna. PHT sendiri bertujuan :

- Memantapkan hasil pada taraf yang telah dicapai oleh teknologi pertanian maju;
- Mempertahankan kelestarian lingkungan;
- Melindungi kesehatan petani produsen dan konsumen;
- Meningkatkan efisiensi masukan dalam berproduksi;
- Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani.

Dari Luas serangan kompleks OPT padi yaitu 21.240,78 ha, dengan kategori intensitas serangan ringan 18.609,23 ha, sedang 1.748,36 ha, berat 518,79 ha dan puso 364,41 ha. Serangan terbesar disebabkan Bakteri hawar daun *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* 5.713,96 ha. Untuk Luas serangan kompleks OPT jagung yaitu 4.177,16 ha, dengan rincian terserang pada kategori intensitas serangan ringan 3.928,74 ha, sedang 197,30 ha, berat 24,47 ha dan puso 26,65 ha. Serangan Ulat Grayak (*Spodoptera Frugiperda*) di Jawa timur tahun 2022 seluas 1.715,84 ha diantaranya puso 2,30 ha. Begitu juga Luas serangan kompleks OPT Kedelai yaitu 155.60 ha dengan rincian terserang dengan intensitas ringan 155.60 ha, sedang, berat, dan puso 0,00 ha. Potensi kehilangan hasil dari Penggulung daun sebesar 62.17 ha.

Capaian indikator Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Hortikultura tercapai 128% karena Pengendalian dengan menggunakan pestisida dilakukan paling banyak untuk menekan serangan pada tanaman hortikultura. Pengendalian dengan pestisida pada penyakit virus kuning pada tanaman cabai dilakukan untuk menekan vektor dari virus kuning. Pengendalian dengan menggunakan pestisida pada tanaman bawang merah selama satu musim tanam bisa dilakukan 3 sampai 6 kali untuk menekan Ulat Bawang.

Dari serangan 18 jenis OPT cabai di Jawa Timur dengan total luas serangan mencapai 2.645,51 Ha yang terdiri dari serangan ringan 2.348,95 ha, sedang 260,51 ha, berat 33,78 ha, dan puso 2,27 ha. Serangan penyakit yang paling tinggi adalah serangan virus kuning (742,81 ha) dengan intensitas ringan hingga puso. Sedangkan serangan 11 jenis OPT bawang merah di Jawa Timur yaitu 5 jenis dari kelompok hama dan 6 jenis dari kelompok penyakit dengan total luas serangan mencapai 989,94 Ha yang terdiri dari serangan ringan 293,91 ha, sedang 73,25 ha, berat 12,30 ha dan puso 0 ha. jenis hama dengan potensi kerusakan tertinggi adalah Ulat Bawang (*Spodoptera exigua*) (173,68 ha) dengan intensitas serangan ringan hingga sedang.

Capaian Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan tercapai 119 % karena Penerapan penanganan DPI merupakan kegiatan pemberdayaan petani untuk menerapkan penanganan DPI (banjir/kekeringan) melalui teknologi adaptasi di lahan usaha taninya, terutama pada daerah rawan terkena banjir/kekeringan. Penanganan DPI melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat kelompok tani/gapoktan merupakan salah satu upaya pengamanan produksi tanaman pangan. Kegiatan adaptasi difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif terhadap kekeringan/genangan, salinitas, umur genjah, teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air dan lain-lain. Kegiatan mitigasi difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi, antara lain: varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan/atau kapasitas absorpsi karbon tinggi, penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan pupuk organik.

Capaian Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Hortikultura hanya tercapai 89% karena terjadi

hujan sepanjang tahun akibat pengaruh dari La Nina menyebabkan adanya pergeseran pola tanam dan jadwal tanam sehingga menyebabkan tingginya tanaman yang terkena banjir terutama tanaman hortikultura. Alternatif solusi dengan melaksanakan adaptasi dan mitigasi antara lain dengan perbaikan infrastruktur, sanitasi lingkungan, perbaikan drainase, dan persiapan pompa air.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 17. Tingkat efisiensi Sasaran Strategis Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	127%	98,60%	28,40%
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura	128%	98,60%	29,40%
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	119%	100%	19,00%
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura	93%	100%	7%

Tingkat Efisiensi Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan 28,40% dengan presentase capaian kinerja 127% dari penyerapan anggaran 98,60%. Untuk Tingkat efisiensi Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura sebesar 29,40% dengan capaian kinerja 128% dari penyerapan anggaran 98,60%. Sedangkan tingkat efisiensi Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan sebesar 19% dengan presentase capaian kinerja 119% dari penyerapan anggaran 100%. Untuk tingkat efisiensi Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura

sebesar 7% dengan presentase capaian kinerja 93% dari penyerapan anggaran 100%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian dari sasaran rasio luas terkena OPT dan DPT pada tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh beberapa program kegiatan diantaranya: Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 18. Nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Penguatan Internal, Anggaran	Skor	82,75	83,61	101%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Capaian indikator Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah tercapai 101%.

Tabel 19. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Penguatan Internal, Anggaran	Skor	82,75	82,98	83,61

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Capaian indikator Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 terjadi penigkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,75%. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 meningkat sebesar 1,03%.

Tabel 20. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 dengan target akhir di Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prespektif	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Kemajuan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Penguatan Internal, Anggaran	Skor	82,75	83,61	101%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Capaian indikator Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 sebesar 101% dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Capaian indikator Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 sebesar 101% karena rekomendasi dari hasil Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya ditindaklanjuti dengan baik. Sehingga hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Secara umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja.

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan
- Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik yaitu belum dilengkapi dengan definisi operasional atas indikator kinerja serta target yang ditetapkan masih belum measurable sehingga tidak memenuhi kriteria SMART
- Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur belum menjelaskan informasi terkait dengan pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Sebagai upaya peningkatan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas
- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyusun definisi operasional atas setiap indikator yang digunakan serta menetapkan target yang “measurable” agar memenuhi kriteria SMART
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan melengkapi penjelasan terkait hambatan dalam pencapaian indikator kinerja
- Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring pencapaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai

- umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 21. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	101%	96,86	4,14%

Tingkat efisiensi evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 4,14% dengan presentase capaian kinerja 101% dari penyerapan anggaran 96,86%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian indikator Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai karena realisasi dari program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, kegiatan perencanaan, pengnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Dukungan APBD Tahun 2022 setelah PAPBD sebesar Rp. 281.741.838.698,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 271.009.502.714,00 atau sebesar 96,19 persen dengan rincian:

Tabel 22. Penganggaran dan Realisasi APBD oleh BLUD sd 31 Desember 2022

Uraian APBD 2022	Pagu Murni 2022 (Rp)	Pagu PAPBD 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (termasuk UPT non BLUD)	246.013.372.667	227.554.488.667	219.491.147.619	96,46
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	39.564.867.000	36.917.932.862	35.076.303.345	95,01
UPT Pengembangan Benih Hortikultura	9.243.166.000	8.884.727.035	8.636.243.150	97,20
UPT Pengembangan Agribisnis Tan. Pangan dan Hortikultura	8.905.317.000	8.384.690.134	7.805.808.600	93,10
Jumlah	303.726.722.667	281.741.838.698	271.009.502.714	96,19

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

Pada Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dimanfaatkan untuk Belanja 8 (delapan) Program dengan realisasi Keuangan APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar selain dimanfaatkan untuk belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa juga untuk belanja hibah. Rincian belanja hibah yang dimanfaatkan masyarakat sebagai berikut :

1. Alokasi Hibah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp 20.408.965.242,00 dengan realisasi Rp. 10.791.334.845,00 sampai dengan tanggal 7 Desember atau 52,88 persen yang dilaksanakan melalui Program : a) Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan c) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebagai berikut :
 - a. Hibah barang dengan rincian sebagai berikut :
 - Combine Harvester Besar sebanyak 6 unit sudah teralisasi 100,00 persen serta melalui PAPBD hibah Combine Harvester Besar sebanyak 6 unit juga sudah teralisasi 100,00 persen;
 - Bed Dryer beserta bangunan sebanyak 5 unit masih dalam proses Pengerjaan Bangunan dan Pengawasan Gedung Bed Dryer sebanyak 5 lokasi;

- Hand Traktor sebanyak 34 unit dan Cultivator sebanyak 10 unit telah dilaksanakan 100,00 persen. Untuk PAPBD telah dialokasikan Handtraktor R2 rotary sebanyak 27 unit dan Hand traktor R2 sebanyak 55 unit, pompa air sebanyak 5 unit, cultivator sebanyak 2 unit, dan 1 unit transplanter masih dalam proses Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Hibah kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura untuk Sarana Pengolahan dan Kelengkapannya sebanyak 2 paket dan melalui PAPBD menerima 1 paket telah terlaksana 100,00 persen;
 - Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat meliputi kawasan Bawang Merah, Cabai Besar, Jahe, dan Kunyit telah terlaksana 100 persen dan dalam tahap distribusi. Untuk Kawasan Kencur masih 43,03 persen. Pencairan bulan Desember, dimana saat perencanaan benih tidak ada di e-catalog namun saat pelaksanaan ternyata benih ada didalam e-catalog sehingga harga dibawah perencanaan dan serapannya menjadi dibawah harga PAGU;
 - Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias seluas 9,37 hektar yang dilaksanakan 6 kelompoktani meliputi :
 - Kawasan Durian dengan hibah 500 Batang Benih Durian dan 2000 Kg Pupuk Organik;
 - Kawasan Alpokat dengan hibah 1500 Batang Benih Alpukat dan 2000 Kg Pupuk Organik;
 - Kawasan Melati dengan hibah 2500 Batang Benih Melati dan 1000 Kg Pupuk Organik;
 - Sebanyak 3 kelompok mengembangkan 315 Batang Benih Anggrek dan 2 MI Pupuk Anorganik;
- b. Hibah uang (POKIR) di UPT. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 7.477.464.000,00 dialokasikan untuk sebanyak 78 pokmas telah terealisasi 78 pokmas (100 persen) dan Mendapat tambahan PAPBD menjadi Rp. 7.495.642.000,00 untuk 1 pokmas yang dalam proses administrasi.

Dukungan APBN Tahun 2022 sebesar Rp149.130.973.000,00. dan telah terealisasi sebesar Rp.144.520.314.250,00 atau sebesar 96,91 persen dengan rincian:

Tabel 23. Penganggaran dan Realisasi APBN oleh BLUD sd 31 Desember 2022

Program/ Kegiatan	Pagu Akhir	Realisasi	%	Sisa (Rp)
Dana Dekonsentrasi Tanaman Pangan	7.092.223.000,00	6.991.476.733,00	98,58	100.746.267
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.821.323.000,00	6.742.231.233,00	98,84	79.091.767
Program Dukungan Manajemen	270.900.000,00	249.245.500,00	92,01	21.654.500
Dana Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	36.328.314.000,00	34.106.408.493,00	93,88	2.221.905.507
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6.063.420.000,00	5.578.866.566,00	92,01	484.553.434
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	27.990.500.000,00	26.357.575.602,00	94,17	1.632.924.398
Program Dukungan Manajemen	2.274.394.000,00	2.169.966.325,00	95,41	104.427.675
Dana Dekonsentrasi Tanaman Hortikultura	9.484.680.000,00	9.440.383.270,00	99,53	44.296.730
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	230.740.000,00	229.529.656,00	99,48	1.210.344
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.530.940.000,00	6.494.683.549,00	99,44	36.256.451
Program Dukungan Manajemen	2.723.000.000,00	2.716.170.065,00	99,75	6.829.935
Dana Tugas Pembantuan Tanaman Hortikultura	6.389.560.000,00	6.074.277.388,00	95,07	315.282.612
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.161.560.000,00	4.010.464.718,00	96,37	151.095.282
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.928.000.000,00	1.774.763.610,00	92,05	153.236.390
Program Dukungan Manajemen	300.000.000,00	289.049.060,00	96,35	10.950.940
Dana Dekonsentrasi Prasarana dan Sarana Pertanian	1.440.310.000,00	1.125.230.317,00	78,12	315.079.683
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.125.030.000,00	815.957.167,00	72,53	309.072.833
Program Dukungan Manajemen	315.280.000,00	309.273.150,00	98,09	6.006.850
Dana Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian	71.138.542.000,00	69.688.172.739,00	97,96	1.450.369.261
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	68.402.962.000,00	67.100.908.052,00	98,10	1.302.053.948
Program Dukungan Manajemen	2.735.580.000,00	2.587.264.687,00	94,58	148.315.313
Dana Dekonsentrasi Penyuluhan	17.257.344.000,00	17.094.365.310,00	99,06	162.978.690
Program Pendidikan	17.257.344.000,00	17.094.365.310,00	99,06	162.978.690

Program/ Kegiatan	Pagu Akhir	Realisasi	%	Sisa (Rp)
dan Pelatihan Vokasi				
Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	17.257.344.000,00	17.094.365.310,00	99,06	162.978.690
Jumlah Dana Dekonsentrasi	35.274.557.000,00	34.651.455.630,00	98,23	623.101.370
Jumlah Dana Tugas Pembantuan	113.856.416.000,00	109.868.858.620,00	96,50	3.987.557.380
APBN	149.130.973.000,00	144.520.314.250,00	96,91	4.610.658.750,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2022

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan diatas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan Tindakan antisipasif ke depan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui beberapa langkah strategis, diantaranya:

- Perbaikan kualitas sumberdaya lahan dengan rehabilitasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, budidaya tanaman spesifik lokasi, budidaya tanaman sehat (mengelola agroekosistem sesuai pertumbuhan tanaman dan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan);
- Meningkatkan Produktivitas dengan cara penggunaan alat mesin pertanian prapanen, optimalisasi penggunaan pupuk berimbang dan pupuk organik;
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun instansi vertikal lintas sektor bersama dengan Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota terutama pada inventarisasi lahan LP2B;
- Meningkatkan koordinasi antar Dinas lingkup Pertanian baik di tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawalan perencanaan kebutuhan pupuk melalui penyusunan RDKK, pengawalan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing komoditas;
- Penyaluran bantuan mesin pertanian terutama untuk kegiatan on farm; pengembangan penerapan manajemen teknologi sarana dan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil sebagai upaya menurunkan susut hasil, memperbaiki mutu hasil, memberikan nilai tambah serta meningkatkan daya saing produk;

- f. Perbaiki jaringan irigasi dan penerapan pola partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana irigasi di tingkat usaha tani;
- g. Melaksanakan Sekolah Lapang (SL) GAP dikawasankawasan sentra produksi;
- h. Mengoptimalkan fungsi tenaga Penyuluh Pertanian, baik PNS, THL-TB maupun penyuluh swadaya;
- i. Melaksanakan optimalisasi Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat dengan pemberian bantuan hibah berupa gabah isi lumbung;
- j. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Distribusi Pangan dalam rangka stabilisasi harga pangan;
- k. Pemberdayaan masyarakat Daerah Rawan Pangan dengan cara pemberian Hibah Alat Olahan Pangan;
- l. Melakukan kampanye dan sosialisasi B2SA kepada masyarakat, melaksanakan lomba cipta menu berbasis pangan lokal dan pelatihan pengembangan teknologi pangan olahan berbasis pangan lokal;
- m. Meningkatkan Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

IV. PENUTUP

Dari Perubahan Target Renstra 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan seluruh sasaran strategis dan program kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja 2022. Semua sasaran dan program terealisasi dengan nilai yang dominan memenuhi target dibandingkan dengan target Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak menemui kendala dan kekurangan, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

V.LAMPIRAN

Lampiran i. Form Pendanaan Indikatif Pada Renstra

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembangunan Pertanian Dan KP(Program Strategis dan Penunjang) • Dinas dan BLUD					343.016.052		331.898.643		337.250.939		342.356.423		1.011.506.005	Dinas Dan Blud
	• Dinas dan Non BLUD					271.932.852		266.904.013		270.909.859		274.830.942		812.644.814	Dinas Dan Non Blud
	Program Strategis					47.638.520		35.045.500		35.791.000		36.529.468		107.365.968	Dinas Dan Non Blud
20903	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	91,20	88,88	2.972.710	89,90	2.606.500	91,10	2.647.000	92,20	2.367.500	92,20	7.621.000	Bid KP
20903101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan	Jumlah prognosa pangan dan harga	Dokumen	13	13	1.253.270	13	825.000	13	900.000	13	975.000	39	2.700.000	Bid KP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Harga Pangan														
2090310101	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah informasi Harga Pangan	Dokumen	12	12	150.000	12	175.000	12	200.000	12	225.000	36	600.000	Bid KP
		Jumlah Informasi Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	Bid KP
2090310102	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang terfasilitasi	Kelompok	25	4	325.000	6	350.000	8	375.000	10	400.000	24	1.125.000	Bid KP
		Jumlah Kelompok Usaha Olahan Pangan Lokal	Kelompok	10	10	-	12	-	14	-	16	-	42	-	Bid KP
2090310103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Kegiatan Gelar Pangan Murah Berkualitas	Lokasi	-	10	778.270	10	300.000	10	325.000	10	350.000	30	975.000	Bid KP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Koordinasi/ sinkronisasi Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen, Pedagang Eceran dan Grosir	Kali	4	4	-	4	-	4	-	4	-	12	-	Bid KP
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok dan Pasokan	Kali	3	3	-	5	-	6	-	8	-	19	-	Bid KP
20903102	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah cadangan pangan provinsi	ton	139	200	206.000	200	256.500	200	307.000	200	357.500	200	921.000	Bid KP
2090310201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang terfasilitas	Kelp	10	10	100.000	10	125.000	10	150.000	10	175.000	30	450.000	Bid KP
2090310202	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Analisa Ketersediaan Pangan	Dokumen	1	1	100.000	1	125.000	1	150.000	1	175.000	3	450.000	Bid KP
209031020	Koordinasi,	Jumlah	Kali	2	2	6.000	2	6.500	2	7.000	2	7.500	6	21.000	Bid KP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi													
20903104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah promosi Pengane karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan UMKM yang terfasilitasi	Kali	-	26	1.513.440	26	1.525.000	26	1.440.000	26	1.035.000	78	4.000.000	Bid KP
2090310401	Promosi Pengane karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengane karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kali	-	5	688.440	5	685.000	5	590.000	5	495.000	15	1.770.000	Bid KP
		Jumlah UKM Pangan yang difasilitasi dalam rangka Pameran Pengane karag	UKM	10	15	-	15	-	15	-	15	-	45	-	Bid KP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		aman Pangan BZSA													
2090310402	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	Kali	3	2	300.000	2	310.000	2	315.000	2	365.000	6	990.568	Bid KP
2090310403	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun	Kali	-	3	525.000	3	530.000	3	535.000	3	540.000	9	1.605.000	Bid KP
		Jumlah Analisa Pola Konsumsi Pangan Berbasis Skor PPH	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	Bid KP
20904	Program Penanganan	Persentase Penurunan daerah rawan	%	-	1,00	485.730	1,00	495.000	1,00	510.000	1,00	530.000	3,00	1.535.000	Bid KP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kerawanan Pangan	pangan													
		Penanganan Daerah rentan rawan pangan	Kelompok	20	20	-	20	-	20	-	20	-	60	-	BKP
20904101	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	1	150.000	1	155.000	1	160.000	1	165.000	3	480.000	Bid KP
2090410101	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten / Kota yang menyusun peta kerawanan pangan	Kab/Kota	38	38	150.000	38	155.000	38	160.000	38	165.000	38	480.000	Bid KP
20904102	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi	Desa	20	5	335.730	5	340.000	5	350.000	5	365.000	15	1.055.000	Bid KP
2090410201	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kali	3	3	292.730	3	295.000	3	300.000	3	310.000	9	905.000	Bid KP
209041020	Pelaksanaan Pengadaan,	Jumlah Pelaksanaan	Lokasi	-	3	43.000	3	45.000	3	50.000	3	55.000	9	150.000	Bid KP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
20905	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tersertifikasi/ Terdaftar (%)	%	34	85	873.406	96	928.000	120	1.046.000	150	989.000	150	2.963.000	UPT PSHP
20905101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	Bulan	12	12	873.406	12	928.000	12	1.046.000	12	989.000	12	2.963.000	UPT PSHP
2090510102	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas	Jumlah Sertifikasi Prima	Unit	28	10	420.816	12	495.000	15	570.000	18	560.000	45	1.625.000	UPT PSHP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah sertifikasi Health Certificate	Unit	303	200	-	220	-	250	-	275	-	745	-	UPT PSHP
		Jumlah registrasi (dokumen) Pangan segar asal tumbuhan	Unit	349	80	-	96	-	120	-	150	-	366	-	UPT PSHP
		Jumlah registrasi (Dokumen) Registrasi Packing House	Rekomendasi	2	2	-	2	-	2	-	2	-	6	-	UPT PSHP
2090510103	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi pengawasan	Unit	64	70	152.590	84	130.000	98	170.000	112	120.000	294	420.000	UPT PSHP
2090510104	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Kab/Kota	38	38	300.000	38	303.000	38	306.000	38	309.000	38	918.000	UPT PSHP
32702	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase Peningkatan produksi	%	2,88	1,00	8.028.342	1,50	6.870.000	2,00	7.067.000	2,50	7.391.400	2,50	21.328.400	Bid Tan Pangan

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sarana Pertanian	tanaman pangan													(TP)
		Persentase Peningkatan produksi hortikultura	%	8,62	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	Bid Hortikultura
		Persentase Peningkatan indeks pertanaman	%	0,06	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	Bid Prasarna dan Sarana Pertanian (PSP)
32702101	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana alsintan	Unit	184	77	6.660.237	63	5.720.000	68	5.912.000	73	6.231.400	259	17.863.400	Bid PSP
3270210101	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, Dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	%	99,80	100,00	6.660.237	100,00	5.720.000	100,00	5.912.000	100,00	6.231.400	100,00	17.863.400	Bid PSP
		Jumlah hibah alsintan pra panen	Unit	13	55	-	36	-	36	-	36	-	163	-	Bid PSP
		Jumlah sarana pertanian cooperative Farming	Unit	5	11	-	3	-	5	-	7	-	15	-	Bid TP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Hibah pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	154	9	-	12	-	15	-	18	-	45	-	Bid TP
		Jumlah Hibah pasca Panen Tanaman Hortikultura	Kab/Kota	12	12	-	12	-	12	-	12	-	36	-	Bid Hortikultura
		Fasilitasi Pembiayaan, AUP, pelaku usaha dan analisa usaha tani	Paket	38	38	-	38	-	38	-	38	-	38	-	Bid PSP
32702102	Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Peningkatan Benih bersertifikat	%	-	1,25	1.368.105	1,25	1.150.000	1,25	1.155.000	1,25	1.160.000	1,25	3.465.000	UPT PSBTPH; UPT PBPP; UPT PBH
3270210202	Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih /Bibit Hortikultura	-	-	-	-	303.176	-	470.000	-	485.000	-	500.000	-	1.455.000	UPT PSBTPH
		Jumlah benih tersertifikasi tanaman hortikultura	Ton	3.363	2.600	-	2.700	-	2.800	-	2.900	-	8.400	-	UPT PSBTPH
		Jumlah Penerbitan Sertifikasi Benih	unit	3.363	1.383	-	1.417	-	1.453	-	1.489	-	4.359	-	UPT PSBTPH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Hortikultura													
		Jumlah Pengawasan Benih Hortikultura (Pelabelan Ulang)	unit	3.363	2	-	2	-	2	-	2	-	6	-	UPT PSBTPH
		Dokumen Pengawasan / Pengecekan Mutu Benih Hortikultura yang Beredar	unit	3.363	287	-	294	-	302	-	309	-	905	-	UPT PSBTPH
3270210203	Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	-	-	-	-	1.064.929	-	680.000	-	670.000	-	660.000	-	2.010.000	UPT PSBTPH
		Jumlah benih tersertifikasi tanaman pangan	Ton	55.016	49.000		49.500		50.000		50.500		150.000		UPT PSBTPH
		Jumlah Penerbitan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Unit	7.107	7.285	-	7.467	-	7.653	-	7.845	-	-	-	UPT PSBTPH
		Jumlah Pengawasan Benih	Unit	1.207	1.237	-	1.268	-	1.300	-	1.332	-	-	-	UPT PSBTPH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tanaman Pangan (Pelabelan Ulang)													
		Dokumen Pengawasan/ Pengecekan Mutu Benih TP Yang Beredar	Unit	663	680	-	697	-	714	-	732	-	-	-	UPT PSB TPH
32703	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	2,88	1,00	5.973.561	1,50	5.810.000	2,00	6.115.000	2,50	6.360.000	2,50	18.285.000	Bid PSP, TP
		Peningkatan produksi hortikultura	%	8,62	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	Bid PSP, Hortikultura,
		Peningkatan indeks pertanaman	%	0,06	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	Bid PSP,TP
32703101	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Kawasan	Ha	7	577	5.973.561	627	5.810.000	679	6.115.000	731	6.360.000	2.037	18.285.000	Bid PSP, TP, Hortikultura
		Jumlah Prasarana	Unit	-	52	-	52	-	52	-	52	-	156	-	Bid PSP, TP, Hortikultura,
3270310101	Perencanaan Pengembangan	-	-	-	-	5.323.561	-	4.760.000	-	4.960.000	-	5.090.000	-	14.810.000	Bid PSP, TP,

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian														Hortikultura
		Jumlah Prasarana kawasan Agropolitan	Unit	-	20	-	20	-	20	-	20	-	60	-	Bid PSP
		Jumlah Prasarana kawasan Anti Poverty Program	Unit	-	32	-	32	-	32	-	32	-	96	-	Bid PSP
		Kawasan Serealia	Ha	-	500	-	550	-	600	-	650	-	1.800	-	Bid TP
		kawasan aneka kacang dan Umbi	Ha	-	18	-	22	-	24	-	26	-	72	-	Bid TP
		Kawasan Buah dan tanaman hias	Ha	7	25	-	25	-	25	-	25	-	75	-	Bid Hortikultura
		Kawasan sayur dan tanaman obat	Ha	-	34	-	30	-	30	-	30	-	90	-	Bid Hortikultura
3270310104	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Di	Jumlah terbinanya pendayagunaan lahan dan air di kabupaten/ko	Kab/Kota	38	38	650.000	38	1.050.000	38	1.155.000	38	1.270.000	38	3.475.000	Bid PSP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tingkat Usaha Tani	ta													
32705	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penurunan potensi kehilangan hasil akibat serangan organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI	%	1,52	3,75	27.098.575	3,69	15.939.000	3,63	15.989.000	4	16.089.000	4	48.017.000	UPT Proteksi
32705101	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Prosentase luas areal pengendalian dan penanggulang an bencana OPT dan DPI	-	-	-	27.098.575	-	15.939.000	-	15.989.000	-	16.089.000	-	48.017.000	UPT Proteksi
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	%	99,90	75,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	UPT Proteksi
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan	%	87,00	75,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	UPT Proteksi

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DPT Tanaman Hortikultura													
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	%	95,40	60,00	-	62,00	-	64,00	-	65,00	-	65,00	-	UPT Proteksi
		Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Hortikultura	%	95,40	60,00	-	62,00	-	64,00	-	65,00	-	65,00	-	UPT Proteksi
3270510101	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Jumlah laporan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura (dokumen)	Dokumen	200	200	1.402.600	200	1.800.000	200	1.850.000	200	1.950.000	600	5.600.000	UPT Proteksi
		Jumlah lokasi menerapkan Manajemen Tanaman	Unit	3	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	UPT Proteksi

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sehat (unit)													
		Jumlah Petani Penerap MTS	orang	75	25	-	30	-	30	-	40	-	100	-	UPT Proteksi
		Jumlah Klinik Tanaman	Unit	3	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	UPT Proteksi
		Peningkatan Ketrampilan Petani dalam Pengendalian OPT (Petani Pengamat)	orang	30	25	-	30	-	30	-	40	-	100	-	UPT Proteksi
		Peningkatan Kelembagaan PPAH	Unit	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	UPT Proteksi
		Jumlah Pengujian mutu dan residu pestisida	Unit	100	100	-	120	-	140	-	150	-	410	-	UPT Proteksi
3270510102	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Jumlah kelompok penerima bantuan	Kelompok	4	171	25.695.975	171	14.139.000	171	14.139.000	171	14.139.000	513	42.417.000	UPT Proteksi
		Peningkatan Kemampuan Petugas dan Petani Dalam	orang	100	150	-	150	-	150	-	150	-	450	-	UPT Proteksi

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		antisipasi DPI													
32707	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Petani melalui Penyuluhan	%	-	2,00	2.206.197	2,00	2.397.000	2,00	2.417.000	2,00	2.437.000	2,00	7.251.000	BKP - Penyuluh
		Tingkat Pemahaman, Kemampuan dan Penerapan Materi pelatihan oleh Purna Widya	%	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	UPT Pelatihan
32707101	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi / dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM	Orang	-	360	640.000	360	650.000	360	660.000	360	670.000	1.080	1.980.000	BKP - Penyuluh
3270710101	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Asn	Jumlah penyuluh ASN yang mengikuti bimtek pengembangan kompetensi penyuluh	orang	-	360	640.000	360	650.000	360	660.000	360	670.000	1.080	1.980.000	BKP - Penyuluh

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pertanian													
32707102	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang difasilitasi /dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM	orang	-	80	1.566.197	80	1.747.000	80	1.757.000	80	1.767.000	240	5.271.000	BKP - Penyuluh
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi	kelompok	-	8	-	8	-	9	-	9	-	26	-	BKP - Penyuluh
3270710202	Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani dan Petugas Lapang Teredukasi Agribisnis	Orang / petani	390	180	1.566.197	420	1.747.000	510	1.757.000	600	1.767.000	1.530	5.271.000	UPT Pelatihan
		Jumlah Kurikulum Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian	Kurikulum	180	6	-	14	-	17	-	20	-	51	-	UPT Pelatihan
		Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok	bulan	6	12	-	12	-	12	-	12	-	36	-	BKP - Penyuluh

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		serta koordinasi program penyuluhan													
		Jumlah penyuluh swadaya yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas penyuluh	Penyuluh	12	50	-	50	-	50	-	50	-	150	-	BKP - Penyuluh
		Jumlah penyuluh yang mengikuti workshop Informasi Teknologi dan manajemen dalam mendukung Kostratani	Penyuluh	-	60	-	60	-	60	-	60	-	180	-	BKP - Penyuluh
		Jumlah penyuluh yang mengikuti diseminasi informasi, teknis dan inovasi pertanian	Penyuluh	-	60	-	60	-	60	-	60	-	180	-	BKP - Penyuluh
		Jumlah KEP	KEP	-	3	-	3	-	4	-	4	-	11	-	BKP - Penyuluh

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		yang fasilitasi													h
		Jumlah pendampingan dalam pembentukan KEP	kali	-	6	-	6	-	6	-	6	-	18	-	BKP - Penyuluh
		Jumlah kelompok tani SL yang difasilitasi	keltan	-	5	-	5	-	5	-	5	-	15	-	BKP - Penyuluh
		Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	A	A		A		A		A		A	0	
	Program Penunjang	Persentase indikator program yang tercapai	%	79,20	100,00	281.958.327	100,00	284.482.507	100,00	288.552.046	100,00	292.954.002	100,00	865.998.555	Dinas Dan BLUD
		Persentase realisasi anggaran	%	93,59	93,00		93,00		93,00		93,00		93,00	-	
		Indeks profesionalitas ASN	%	64,99	64,50		80,00		80,00		80,00		80,00	-	
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase indikator program yang	%	91,49	90,00	224.294.332	90,00	231.858.513	90,00	235.118.859	90,00	238.667.042	90,00	705.644.414	Dinas Dan Non

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Daerah Provinsi	tercapai													Blud
		Persentase realisasi anggaran	%	93,56	93,00		93,00		93,00		93,00		93,00	-	
		Indeks profesionalitas ASN	%	64,99	64,50		80,00		80,00		80,00		80,00	-	
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Capaian kinerja Program	%	100,00	100,00	1.465.556	100,00	1.325.000	100,00	1.400.000	100,00	1.450.000	100,00	4.175.000	Sekr
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	11	645.081	11	645.000	11	670.000	11	695.000	33	2.010.000	Sekr
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kab / Kota (Pertemuan/FGD, dan Observasi lokasi)	Kab/Kota	1	38	815.475	38	675.000	38	725.000	38	750.000	38	2.150.000	Sekr
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi anggaran	%	100	90	214.905.865	90	222.774.513	90	225.967.359	90	229.274.042	90	678.015.914	Sekr
XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	12	12	202.008.892	12	209.890.871	12	213.039.234	12	216.234.823	36	639.164.928	Sekr
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	jumlah laporan Administrasi	Bulan	12	12	11.525.028	12	11.600.000	12	11.700.000	12	11.800.000	36	35.100.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ASN	Pelaksanaan Tugas ASN													
XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	12	634.340	12	601.642	12	540.125	12	545.219	36	1.686.986	Sekr
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	12	12	272.485	12	213.000	12	215.000	12	217.000	36	645.000	Sekr
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	2	2	250.120	2	252.000	2	254.000	2	256.000	6	762.000	Sekr
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr
XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	12	213.000	12	215.000	12	217.000	12	219.000	36	651.000	Sekr
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXXD1103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	1	12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	4.000	36	12.000	Sekr
XXXD110301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencann kebutuhan BMD SKPD	laporan	1	4	1.000	4	1.000	4	1.000	4	1.000	12	3.000	Sekr
XXXD110303	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	3	3.000	Sekr
XXXD110305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	1	12	1.000	12	1.000	12	1.000	12	1.000	36	3.000	Sekr
XXXD110306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	6	3.000	Sekr
XXXD1105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	1	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	36	9.000	Sekr
XXXD110503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi	laporan	12	12	1.000	12	1.000	12	1.000	12	1.000	36	3.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		kepegawaian													
XXX0110503	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	12	1.000	12	1.000	12	1.000	12	1.000	36	3.000	Sekr
XXX0110503	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	12	12	1.000	12	1.000	12	1.000	12	1.000	36	3.000	Sekr
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	12	12	1.362.756	12	781.500	12	795.500	12	1.009.500	36	2.586.500	Sekr
XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	5	5	41.718	5	35.000	5	35.500	5	36.000	15	106.500	Sekr
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	6	6	156.475	6	148.000	6	150.000	6	152.000	18	450.000	Sekr
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Paket	1	2	29.830	2	27.000	2	28.000	2	29.000	6	84.000	Sekr
XXX0110604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	1	1	41.510	1	12.000	1	13.000	1	14.000	3	39.000	Sekr
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	1	2	47.660	2	73.000	2	74.000	2	75.000	6	222.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXX0110606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	-	-	14.400	-	15.000	-	16.000	-	17.000	-	48.000	Sekr
XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Paket	5	1	95.970	1	52.000	1	53.000	1	54.000	3	159.000	Sekr
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	2	909.512	1	360.000	1	365.000	1	570.000	3	1.295.000	Sekr
XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	1	1	10.082	1	11.000	1	12.000	1	13.000	3	36.000	Sekr
XXX0110611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	Paket	1	1	15.600	1	48.500	1	49.000	1	49.500	3	147.000	Sekr
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah persentase pembelian barang	%	-	95	585.270	100	465.000	100	480.000	100	495.000	100	1.440.000	Sekr
XXX0110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	-	23	348.270	23	315.000	23	325.000	23	335.000	69	975.000	Sekr
XXX0110711	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah paket	Paket	1	1	237.000	1	150.000	1	155.000	1	160.000	3	465.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan													
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Jasa	Bulan	12	12	5.144.911	12	4.330.000	12	4.273.000	12	4.215.000	36	12.818.000	Sekr
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	-	1	10.290	1	25.000	1	28.000	1	30.000	3	83.000	Sekr
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	1.684.196	12	1.700.000	12	1.710.000	12	1.720.000	36	5.130.000	Sekr
XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	Paket	1	1	234.025	1	205.000	1	210.000	1	215.000	3	630.000	Sekr
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Bulan	-	12	3.216.400	12	2.400.000	12	2.325.000	12	2.250.000	36	6.975.000	Sekr
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang	Bulan	12	12	822.974	12	2.175.500	12	2.196.000	12	2.216.500	36	6.588.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	-	17	396.474	17	430.000	17	435.000	17	440.000	51	1.305.000	Sekr
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	-	17	300.000	17	400.000	17	400.000	17	400.000	51	1.200.000	Sekr
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Laporan	-	12	126.500	12	45.500	12	46.000	12	46.500	36	138.000	Sekr
XXX0110910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	2	13	-	-	1.300.000	-	1.315.000	-	1.330.000	-	3.945.000	Sekr
	UPT Pengembangan Benih Padi Dan Palawija (BLUD)					51.814.296		46.309.714		47.299.965		48.144.524		141.754.203	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															(UPT PBPP)
32702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi benih tanaman pangan	%	3	3	11.233.255	3	9.573.304	3	10.096.258	3	10.378.953	3	30.048.516	UPT PBPP
32702102	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Peningkatan produksi benih bersertifikat	%	6	3	7.382.603	3	4.786.652	3	5.048.129	3	5.189.477	3	15.024.258	UPT PBPP
		Jumlah benih tersertifikasi tanaman pangan	Kg	1.969.981	1.796.626	3.850.652	1.844.913	4.786.652	1.894.797	5.048.129	1.947.917	5.189.477	7.484.253	15.024.258	UPT PBPP
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	persen	100	100	40.581.041	100	36.736.410	100	37.203.707	100	37.765.570	100	111.705.687	UPT PBPP
		Persentase realisasi anggaran	persen	92,84	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	UPT PBPP
		Indeks profesionalitas ASN	persen	NA	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	UPT PBPP
XXX01102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan	Bulan	100	12	19.776.217	12	20.917.427	12	21.026.834	12	21.165.846	12	63.110.107	UPT PBPP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		tunjangan													
XXX0110201	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	19.573.921	12	20.715.131	12	20.816.834	12	20.945.846	36	62.477.811	UPT PBPP
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	12	202.296	12	202.296	12	210.000	12	220.000	36	632.296	UPT PBPP
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian	Laporan	1	1	30.000	1	37.500	1	46.875	1	58.594	3	142.969	UPT PBPP
XXX0110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	1	1	30.000	1	37.500	1	46.875	1	58.594	3	142.969	UPT PBPP
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pelayanan administrasi	Bulan	12	12	1.601.103	12	1.799.000	12	1.875.000	12	1.700.741	36	5.374.741	UPT PBPP
XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	1	1	104.300	1	110.000	1	120.000	1	120.000	3	350.000	UPT PBPP
XXX0110603	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	214.412	1	220.000	1	220.000	1	240.000	3	680.000	UPT PBPP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kantor														
XXXD110604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	148.667	1	200.000	1	210.000	1	220.000	3	630.000	UPT PBPP
XXXD110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	33.084	1	34.000	1	35.000	1	36.000	3	105.000	UPT PBPP
XXXD110606	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	-	1	25.000	1	35.000	1	40.000	1	45.000	3	120.000	UPT PBPP
XXXD110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	1.075.640	1	1.200.000	1	1.250.000	1	1.039.741	3	3.489.741	UPT PBPP
XXXD1107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah persentase pembelian barang	%	95	100	460.000	100	829.733	100	478.610	100	488.182	100	1.796.526	UPT PBPP
XXXD110703	Pengadaan Alat Besar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	5	1	-	1	360.508	1	-	1	-	3	360.508	UPT PBPP
XXXD110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	1	1	460.000	1	469.226	1	478.610	1	488.182	3	1.436.018	UPT PBPP
XXXD1108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa	Bulan	12	12	1.668.092	12	1.687.500	12	1.776.875	12	1.813.219	36	5.277.594	UPT PBPP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	786.232	12	787.500	12	826.875	12	838.219	36	2.452.594	UPT PBPP
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Bulan	12	12	881.860	12	900.000	12	950.000	12	975.000	36	2.825.000	UPT PBPP
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang	Bulan	12	12	2.400.000	12	1.380.000	12	1.410.000	12	1.420.000	36	4.210.000	UPT PBPP
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	17	17	40.000	12	100.000	12	125.000	12	130.000	36	355.000	UPT PBPP
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Laporan	12	12	100.000	12	120.000	12	125.000	12	130.000	36	375.000	UPT PBPP
XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	7	10	2.260.000	18	1.160.000	18	1.160.000	18	1.160.000	54	3.480.000	UPT PBPP

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bangunan Lainnya														
XXXD1110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan jasa	Bulan	1.828.690	12	14.645.629	12	10.085.250	12	10.589.513	12	11.118.988	36	31.793.751	UPT PBPP
XXXD111001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah produksi benih Padi varietas unggul	Kg	1.828.690	1.856.115	14.645.629	1.883.960	10.085.250	1.912.210	10.589.513	1.946.439	11.118.988	5.742.609	31.793.751	UPT PBPP
		Jumlah produksi benih Palawija varietas unggul	Kg	59.038	59.038	-	92.830	-	97.320	-	98.800	-	288.950	-	UPT PBPP
	UPT Pengembangan Benih Hortikultura (BLUD)					10.388.531		9.315.615		9.479.101		9.636.907		28.431.623	
32702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hortikultura	%	3	1	697.863	1	1.012.000	1	1.015.000	1	1.027.000	1	3.054.000	UPT PBH
32702102	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Benih Hortikultura	%	2	-	697.863	-	1.012.000	-	1.015.000	-	1.027.000	-	3.054.000	UPT PBH
3270210202	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	Jumlah produksi benih sayur	kg	8.250	6.850	-	13.100	-	13.350	-	13.650	-	40.100	-	UPT PBH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hortikultura														
		Jumlah produksi benih buah	batang	4.800	39.000	-	42.250	-	43.100	-	43.950	-	129.300	-	UPT PBH
		Jumlah produksi benih biofarmaka	kg	-	-	-	2.000	-	2.050	-	2.100	-	6.150	-	UPT PBH
		Jumlah produksi benih florikultura	batang	-	-	-	3.000	-	3.050	-	3.100	-	9.150	-	UPT PBH
XXXDI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	%	82	100	9.690.668	100	8.303.615	100	8.464.101	100	8.609.907	100	25.377.623	UPT PBH
		Persentase realisasi anggaran	%	97	93	-	93	-	93	-	93	-	93	-	UPT PBH
		Indeks profesionalitas ASN	%	NA	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	UPT PBH
XXXDIID1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	-	1.000	-	3.000	-	5.000	-	9.000	UPT PBH
XXXDIID1D1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	-	-	-	4	10.000	4	7.000	4	8.000	12	25.000	UPT PATPH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perangkat Daerah	perangkat daerah													
XXXD1102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	bulan	12	12	6.888.486	12	7.059.432	12	7.161.344	12	7.262.702	36	21.483.478	UPT PBH
XXXD110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	12	12	6.407.338	12	6.561.148	12	6.630.344	12	6.705.702	36	19.897.194	UPT PBH
XXXD110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	12	12	481.148	12	488.284	12	531.000	12	557.000	36	1.586.284	UPT PBH
XXXD1106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	5	5	427.887	5	320.003	5	322.757	5	330.205	15	972.965	UPT PBH
XXXD110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1	5.000	1	7.000	1	7.500	1	8.000	3	22.500	UPT PBH
XXXD110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1	3.200	1	3.000	1	3.500	1	4.000	3	10.500	UPT PBH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXX0110604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1	20.000	1	25.000	1	25.000	1	26.000	3	76.000	UPT PBH
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1	10.688	1	11.147	1	11.757	1	12.205	3	35.109	UPT PBH
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	1	388.999	1	273.856	1	275.000	1	280.000	3	828.856	UPT PBH
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	-	-	-	2	141.180	3	160.000	3	170.000	3	471.180	UPT PBH
XXX0110705	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	set	-	-	-	-	-	1	10.000	1	10.000	2	20.000	UPT PBH
XXX0110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	-	-	-	1	6.180	1	15.000	1	20.000	3	41.180	UPT PBH
XXX0110709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	paket	-	-	-	1	135.000	1	135.000	1	140.000	3	410.000	UPT PBH
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12	328.500	12	325.000	12	327.000	12	329.000	36	981.000	UPT PBH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	117.000	12	125.000	12	127.000	12	129.000	48	381.000	UPT PBH
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	2	2	211.500	2	200.000	2	200.000	2	200.000	8	600.000	UPT PBH
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	2	1.734.375	2	130.000	2	146.000	2	152.000	8	428.000	UPT PBH
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	paket	1	1	20.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	3	75.000	UPT PBH
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	-	-	-	1	5.000	1	6.000	1	7.000	3	18.000	UPT PBH
XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung yang dipelihara	paket	7	7	1.714.375	1	100.000	1	115.000	1	120.000	10	335.000	UPT PBH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bangunan Lainnya														
XXX01110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan jumlah benih hortikultura bersertifikat terjual	%	2	2	311.420	2	327.000	2	344.000	2	361.000	2	1.032.000	UPT PBH
XXX011001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah benih varietas unggul sayur bersertifikat terjual	Kg	9.000	8.250	311.420	6.850	327.000	13.100	344.000	13.350	361.000	33.300	1.032.000	UPT PBH
		Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual	Batang	4.800	41.450	-	39.000	-	42.250	-	43.100	-	124.350	-	UPT PBH
		Jumlah benih varietas unggul florikultura bersertifikat terjual	Batang	-	-	-	-	-	2.000	-	2.050	-	4.050	-	UPT PBH
		Jumlah benih varietas unggul Biofarmaka bersertifikat terjual	Kg	-	-	-	-	-	3.000	-	3.050	-	6.050	-	UPT PBH
		Jumlah stakeholder	Orang	70	70	-	5	-	5	-	5	-	15	-	UPT PBH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		terakses informasi benih unggul varietas baru													
		Jumlah masyarakat terinformasi teknologi budidaya	Orang	30	100	-	100	-	100	-	100	-	300	-	UPT PBH
		Jumlah Diversifikasi Usaha	Jenis	-	1	-	2	-	3	-	4	-	6	-	UPT PBH
	UPT Pengembangan Agribisnis Dan Tanaman Pangan (BLUD)					8.880.373		9.369.301		9.562.014		9.744.050		28.675.365	UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PATPH)
32703	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Kebun Agribisnis Tanaman Pangan	Kg	74.127	51.000	1.488.087	61.000	1.775.332	62.000	1.796.635	63.000	1.832.568	186.000	5.404.535	UPT PATPH
		Produksi Kebun Agribisnis Tanaman	Kg	30.326	37.000	-	38.000	-	38.000	-	38.000	-	114.000	-	UPT PATPH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Hortikultura buah-buahan													
		Produksi Kebun Agribisnis Tanaman Hortikultura sayuran	Kg	43.193	26.000	-	27.000	15.989.000	28.000	16.089.000	29.000	16.089.000	84.000	48.167.000	UPT PATPH
32703101	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di UPT Pengembangan Agribisnis TPH	Kg	74.127	51.387	1.488.087	61.650	1.775.332	62.912	1.796.635	64.165	1.832.568	64.165	5.404.535	UPT PATPH
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di UPT Pengembangan Agribisnis TPH	Kg	64.899	81.250	-	84.261	-	87.652	-	91.068	-	91.068	-	UPT PATPH
0	-	Jumlah Komoditas Bersertifikat	-	2	2	-	3	-	3	-	3	-	3	-	UPT PATPH
3270310102	Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas	Jumlah stakeholder terfasilitasi edukasi teknologi	Orang	105	150	1.488.087	150	1.775.332	150	1.796.635	150	1.832.568	450	5.404.535	UPT PATPH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pertanian	agribisnis tanaman pangan dan hortikultura (sertifikat)													
		Jumlah Analisa sampel tanah dan hasil kultur jaringan	unit	255	950	-	1.002	-	1.053	-	1.105	-	3.160	-	UPT PATPH
0	-	Jenis Produk olahan	unit	2	3	-	3	-	3	-	3	-	9	-	UPT PATPH
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	%	83	100	7.392.286	100	7.593.969	100	7.765.379	100	7.911.482	100	23.270.830	UPT PATPH
		Persentase realisasi anggaran	%	93	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	UPT PATPH
		Indeks profesionalitas ASN	%	NA	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	UPT PATPH
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	10.000	-	7.000	-	8.000	-	25.000	UPT PATPH
XXX0110101	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	11	645.081	11	645.000	11	670.000	11	695.000	33	2.010.000	Sekr

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan perangkat daerah													
XXXD1102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Bulan	12	12	4.017.385	12	4.057.944	12	4.118.814	12	4.180.596	36	12.357.354	UPT PATPH
XXXD110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	12	3.905.557	12	3.942.600	12	3.973.814	12	4.020.596	36	11.937.010	UPT PATPH
XXXD110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	111.828	12	115.344	12	145.000	12	160.000	36	420.344	UPT PATPH
XXXD1105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian UPT Pengembangan Agribisnis TPH (BLUD)	Bulan	-	12	-	12	13.125	12	14.000	12	16.000	36	43.125	UPT PATPH
XXXD110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian	Paket	-	-	-	1	13.125	1	14.000	1	16.000	3	43.125	UPT PATPH
XXXD1106	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan	Bulan	12	12	390.209	12	568.369	12	604.258	12	629.258	36	1.801.885	UPT

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perangkat Daerah	administrasi UPT Pengembangan Agribisnis TPH (BLUD)													PATPH
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	215.081	1	301.198	1	316.258	1	316.258	3	933.714	UPT PATPH
XXX0110604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	15.363	1	22.594	1	28.000	1	32.000	3	82.594	UPT PATPH
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	-	1	12.976	1	13.624	1	14.500	1	16.000	3	44.124	UPT PATPH
XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	-	1	10.480	1	60.000	1	65.000	1	75.000	3	200.000	UPT PATPH
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengadaan	Paket	1	1	136.309	1	170.953	1	180.500	1	190.000	3	541.453	UPT PATPH
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	-	1.534.042	1	1.548.696	1	1.626.130	1	1.633.125	3	4.807.951	UPT PATPH
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Penyediaan	Bulan	-	12	293.085	12	307.739	12	323.125	12	323.125	36	953.989	UPT

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik													PATPH
XXXD110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	-	2	1.240.957	2	1.240.957	2	1.303.005	2	1.310.000	6	3.853.962	UPT PATPH
XXXD1109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang UPT Pengembangan Agribisnis TPH (BLUD)	Bulan	-	2	576.740	2	541.985	2	498.635	2	503.134	6	1.543.754	UPT PATPH
XXXD110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	1	1	22.240	1	23.352	1	48.635	1	53.134	3	125.121	UPT PATPH
XXXD110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	paket	2	2	554.500	2	518.633	2	450.000	2	450.000	2	1.418.633	UPT PATPH
XXXD1110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Jumlah PAD	%	16	5	873.910	5	853.850	5	896.543	5	941.369	5	2.691.762	UPT PATPH
XXXD111001	Pelayanan dan Penunjang	masyarakat yang dilayani sesuai	Orang	5.139	6.000	873.910	6.000	853.850	7.000	896.543	8.000	941.369	8.000	2.691.762	UPT PATPH

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Periode Renstra		Penanggung jawab
					Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	Target	X Rp. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelayanan BLUD	dengan SOP													

Lampiran ii. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. HADI SULISTYO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

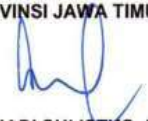
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 01 Desember 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
PIT.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr.Ir.HADI SULISTYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19621115 198801 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Prespektif
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	• Ketersediaan Cadangan Pangan	200 ton	Penerima Layanan
		• Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	5 kelompok	Penerima Layanan
		• Presentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96%	Penerima Layanan
2.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	• Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	1,5%	Penerima Layanan
		• Presentase peningkatan produksi hortikultura	1,0%	Penerima Layanan
3.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman	• Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	78%	Penerima Layanan
		• Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas total serangan OPT Hortikultura	78%	Penerima Layanan
		• Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	62%	Penerima Layanan
		• Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Hortikultura	62%	Penerima Layanan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82,75	Penguatan Internal, Anggaran

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	222.399.566.553	P-APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	11.353.350.000	P-APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	175.000.000	P-APBD
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	1.114.627.750	P-APBD
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	27.488.533.695	P-APBD
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	7.425.001.434	P-APBD
7.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	9.538.063.017	P-APBD
8.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	2.247.696.249	P-APBD
	Total	Rp.	281.741.838.698	P-APBD
9.	a. Dana Dekonsentrasi	Rp.	39.372.374.000	APBN
	b. Dana Tugas Pembantuan	Rp.	114.719.316.000	APBN
	Total	Rp.	154.091.690.000	APBN



 Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Surabaya, 01 Desember 2022
 Pihak Pertama,
Pt.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr.Ir.HADI SULISTYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19621115 198801 1 002

Lampiran iii.Rekapitulasi Data

Data 1. Luas Tanam, dan Panen Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 2022

No	Komoditas	Luas Tanam (hektar)	Luas Panen (hektar)
1.	Jagung	1.071.500,83	1.227.758,33
2.	Kedelai	40.045,01	53.106,81
3.	Kacang Tanah	94.616,77	85.932,73
4.	Kacang Hijau	36.907,02	32.462,21
5.	Ubi Kayu	1.423.942,94	71.087,79
6.	Ubi Jalar	293.784,80	9.455,77

Data 2. Luas Tanam, dan Panen Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 2022

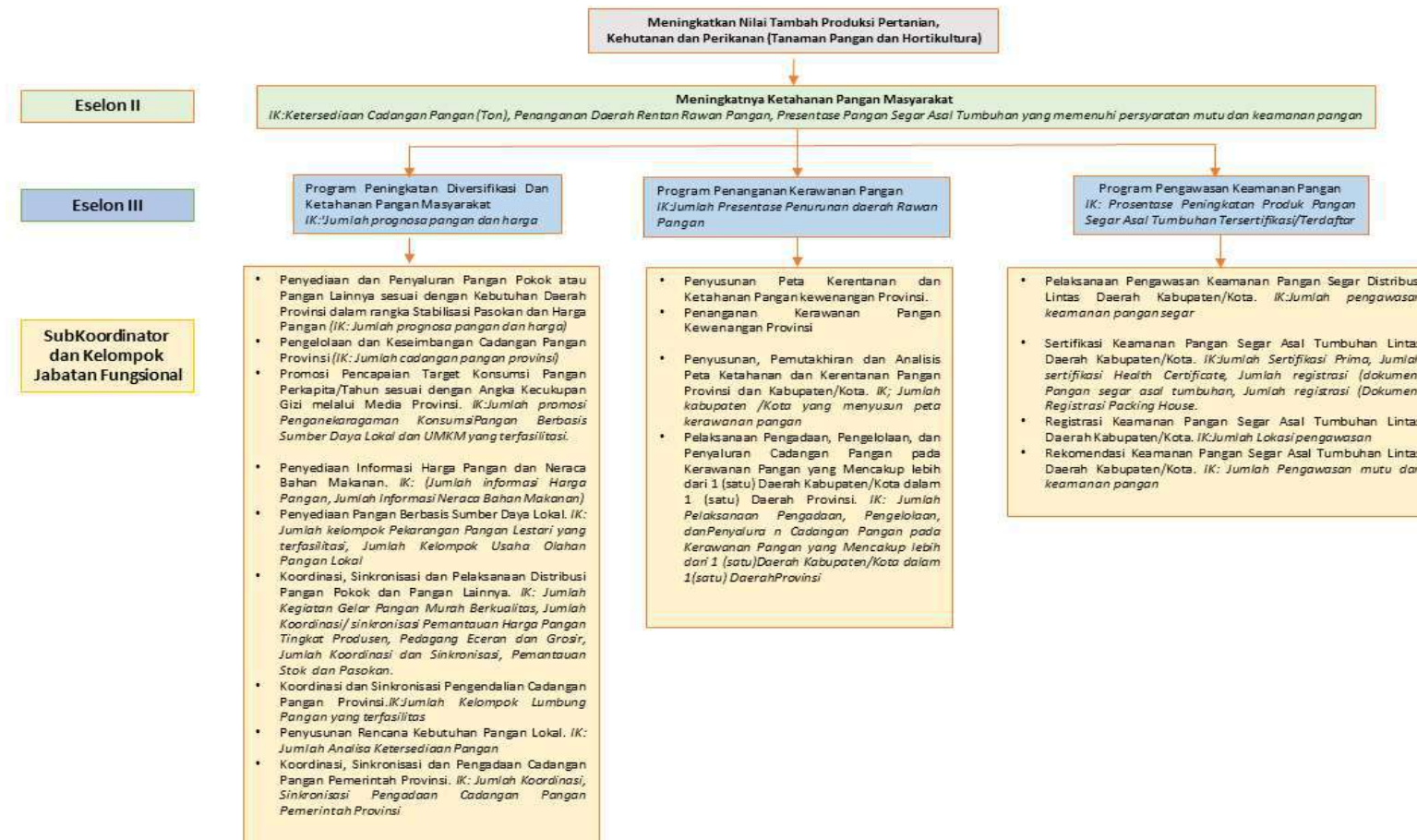
No	Komoditas	Produksi (ton GKG)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Jagung	6.611.654,52	53,85
2.	Kedelai	87.739,22	16,52
3.	Kacang Tanah	94.616,77	11,01
4.	Kacang Hijau	36.907,02	11,37
5.	Ubi Kayu	1.423.942,94	200,31
6.	Ubi Jalar	293.784,80	310,69

Data 3. Produksi Hortikultura Jawa Timur Tahun 2022

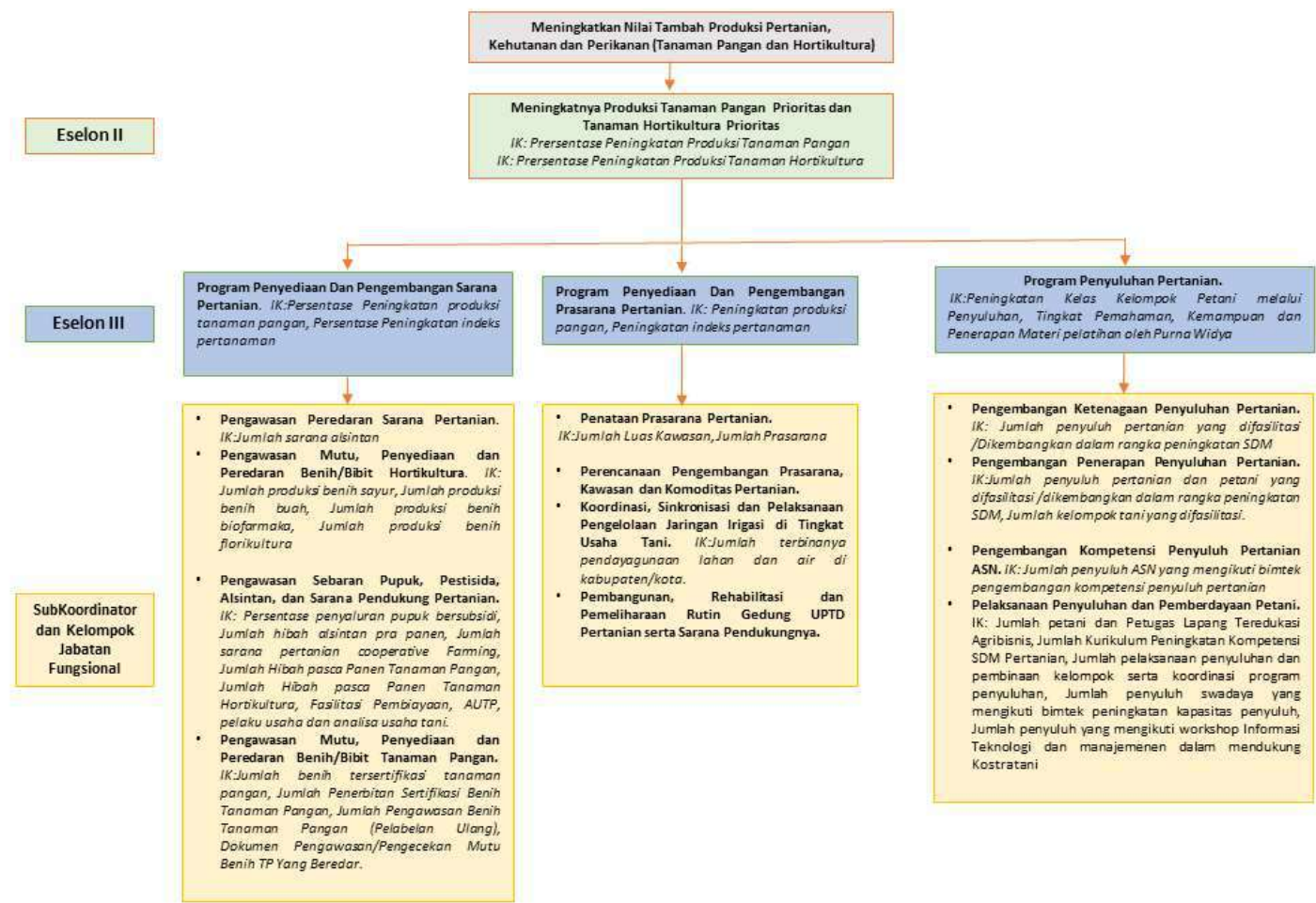
Komoditas	Tahun 2022		Tahun 2021		Perkembangan Luas panen tahun 2022 terhadap 2021		Perkembangan Produksi tahun 2022 terhadap 2021	
	Luas panen (ha)	Produksi (ku)	Luas panen (ha)	Produksi (ku)	+/-	%	+/-	%
Bawang Merah	53.671,0	5.009.921,0	49.022,0	4.384.538,0	-4.649,0	-12,48	-625.383,0	-12,48
Bawang Putih	812,0	42.196,0	212,0	8.509,0	-600,0	-79,83	-33.687,0	-79,83
Cabai Rawit	78.956,0	5.788.830,0	76.714,0	5.658.013,0	-2.242,0	-2,26	-130.817,0	-2,26
Cabai Besar TW/Teropong	10.973,0	976.848,0	7.573,0	771.564,0	-3.400,0	-21,01	-205.284,0	-21,01
Cabai Keriting	4.752,2	297.442,0	4.143,6	286.805,0	-608,6	-3,58	-10.637,0	-3,58
Kentang	15.603,3	3.243.377,0	21.032,6	3.028.974,0	5.429,2	-6,61	-214.403,0	-6,61
Pisang ¹⁾	22.519.687,0	20.489.479,5	22.565.607,0	21.672.144,4	45.920,0	5,77	1.182.664,9	5,77
Jeruk Siam / Keprok ²⁾	8.357.265,0	8.222.603,7	7.507.039,0	9.805.280,9	-850.226,0	19,25	1.582.677,2	19,25
Mangga ²⁾	10.491.602,0	11.928.960,1	6.546.692,0	9.022.770,9	-3.944.910,0	-24,36	-2.906.189,3	-24,36
Manggis ²⁾	334.026,0	316.770,0	386.025,0	644.498,8	51.999,0	103,46	327.728,8	103,46
Jahe	14.356.543,0	27.595.251,0	13.964.467,0	19.818.659,0	-392.076,0	-28,18	-7.776.592,0	-28,18
Kunyit	34.626.494,0	82.988.205,0	26.055.389,0	54.173.616,0	-8.571.105,0	-34,72	-28.814.589,0	-34,72
Temu Lawak	14.783.463,0	23.111.308,0	7.821.615,0	14.203.920,0	-6.961.848,0	-38,54	-8.907.388,0	-38,54
Mawar ³⁾	2.069.889,0	86.328.773,0	2.083.731,0	80.330.337,0	13.842,0	-6,95	-5.998.436,0	-6,95
Sedap Malam ³⁾	2.056.642,0	90.229.492,0	3.104.366,0	112.972.297,0	1.047.724,0	25,21	22.742.805,0	25,21

Lampiran iv.Cascading Kinerja

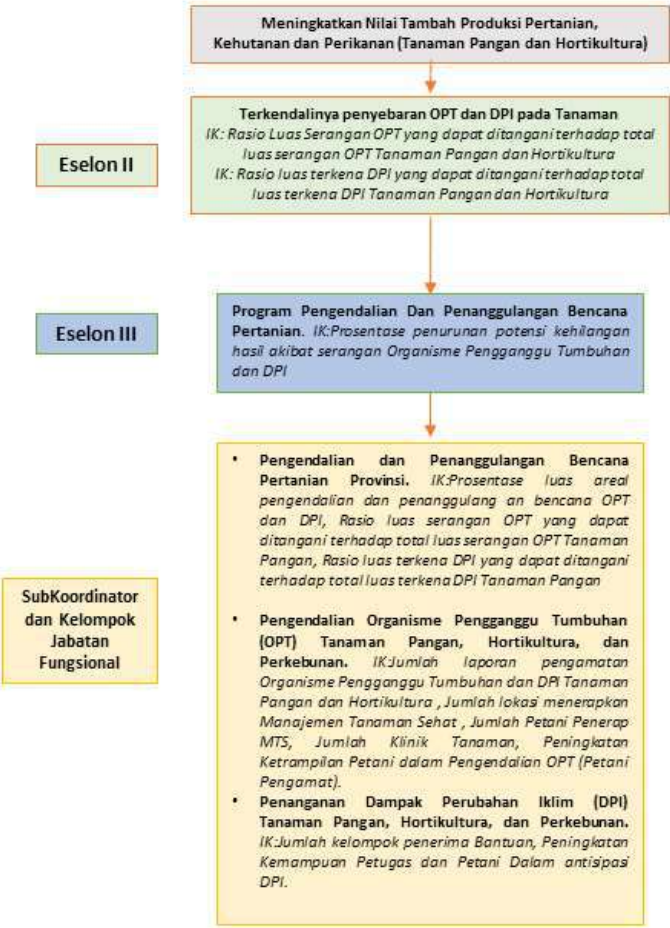
Sasaran Pertama : Meningkatkan Ketahanan Pangan



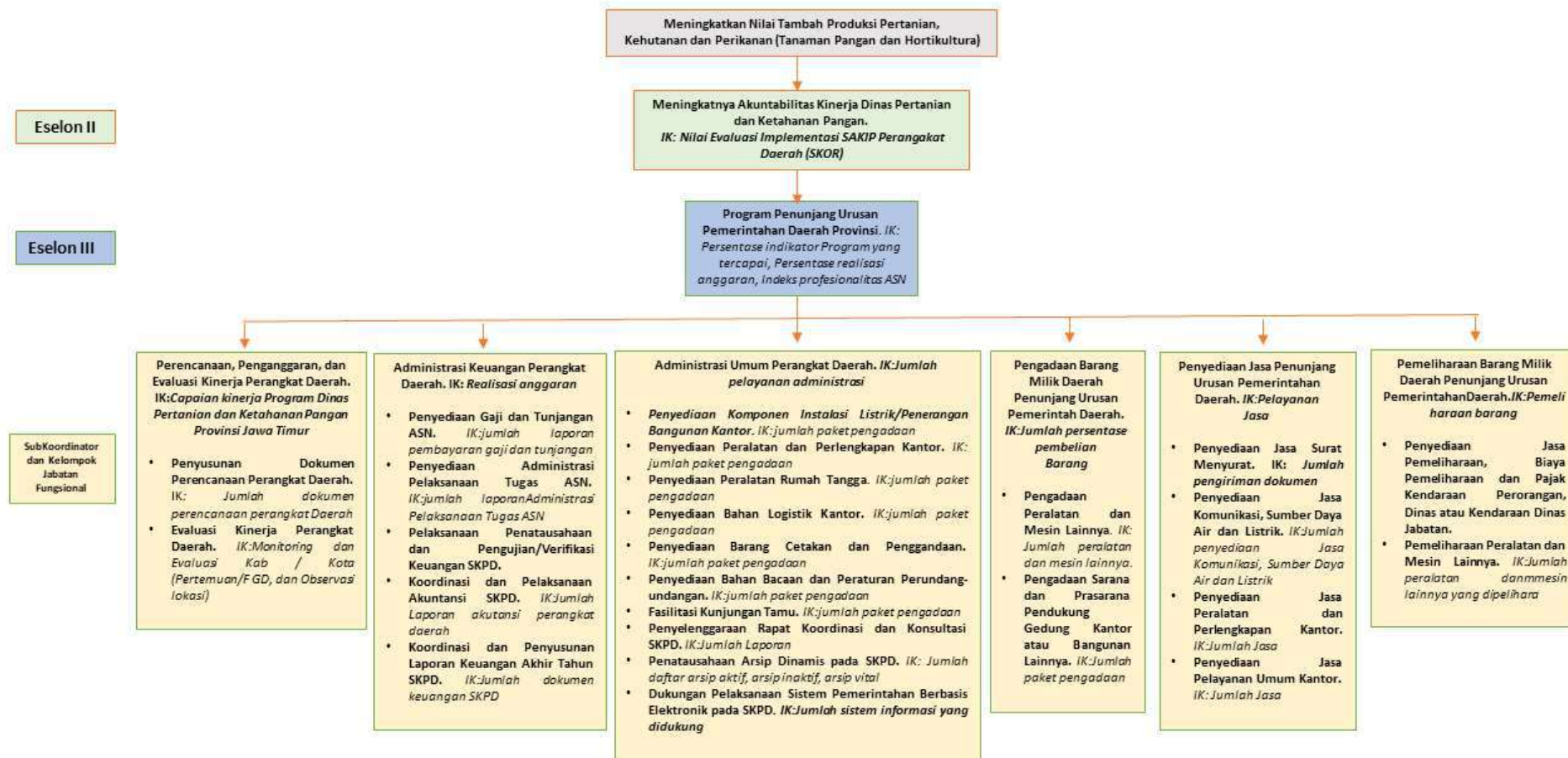
Sasaran Kedua: Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas dan Tanaman Hortikultura Prioritas



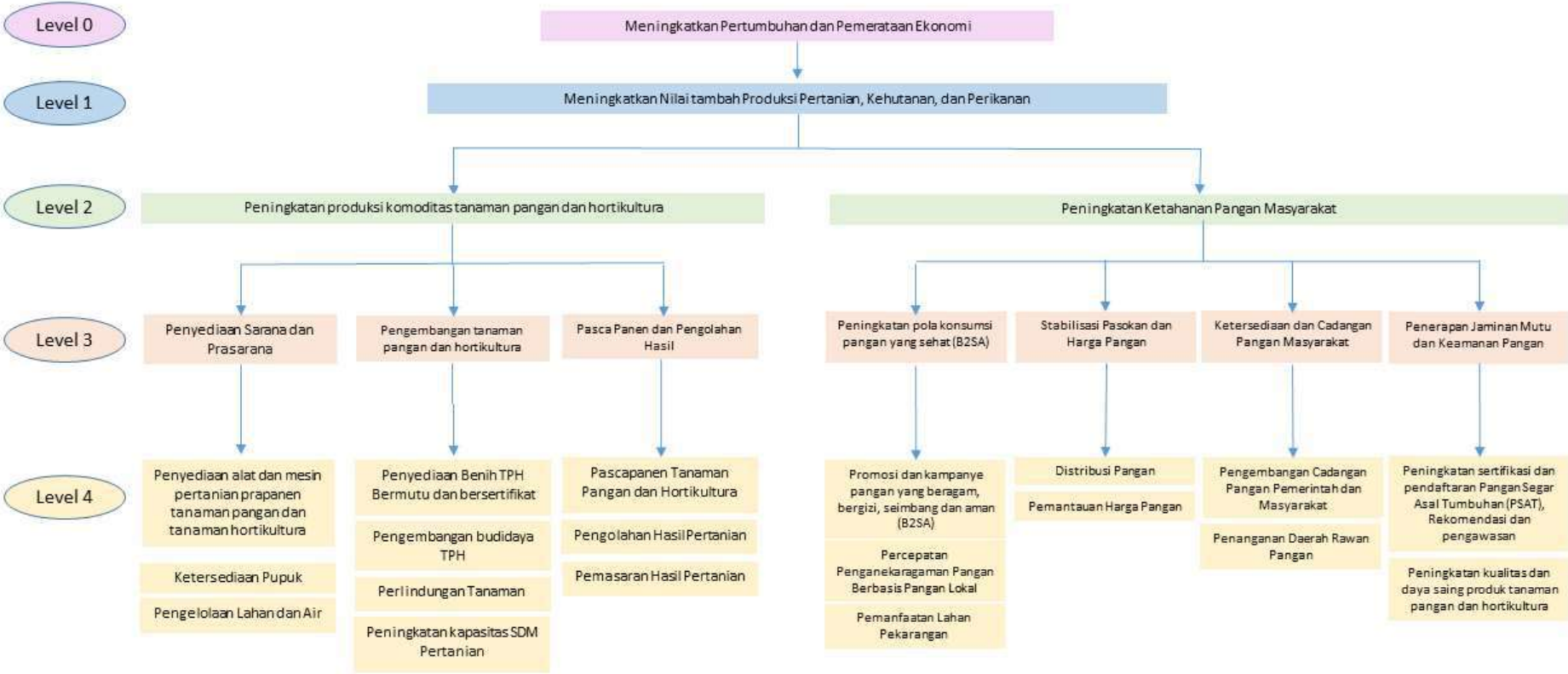
Sasaran Ketiga: Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman



Sasaran Keempat: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Lampiran v.Peta Proses Bisnis



Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
P . 2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	P. 2. 1	Meningkatkan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	P.2. 1.1	Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura	P.2. 1.1. 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana	P.2.1. 1.1.1	Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan dan tanaman hortikultura	P.2.1. 1.1.1. 1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan							Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Kelompok tani
										P.2.1. 1.1.1. 2	Verifikasi kebutuhan alsintan							Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: JF Pengadaan
										P.2.1. 1.1.1. 3	Pengadaan barang alsintan							Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: JF Pengadaan
										P.2.1. 1.1.1. 4	Distribusi alsintan							Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Penyedia (pihak ketiga)

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
								P.2.1.1.1.2	Ketersediaan Pupuk	P.2.1.1.1.2.1	Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	P.2.1.1.1.2.1.1	Penyusunan kebutuhan pupuk melalui E-RDCK					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Petani dan penyuluh
												P.2.1.1.1.2.1.2	Pengiriman data kebutuhan pupuk ke pusat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Petani dan penyuluh
												P.2.1.1.1.2.1.3	Verifikasi oleh pusat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Kementan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 1.2.1.4	Menerbitkan permentan untuk alokasi pupuk					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Kementan
												P.2.1.1. 1.2.1.5	Pembagian alokasi per kabupaten/kota					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP
										P.2.1. 1.1.2. 2	Pembinaan Teknis Penerapan Pupuk Organik	P.2.1.1. 1.2.2.1	Membuat usulan bantuan pengembangan UPPO					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Kelompok Tani/Gapoktan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 1.2.2.2	Verifikasi kelayakan administrasi dan teknis					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota
												P.2.1.1. 1.2.2.3	Peyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan rancangan teknis/desain					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Kelompok Tani/Gapoktan
												P.2.1.1. 1.2.2.4	Pelaksanaan Kegiatan UPPO					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Kelompok Tani/Gapoktan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 1.2.2.5	Penyusunan Laporan Kegiatan UPPO					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Kelompok Tani/Gapoktan
												P.2.1.1. 1.2.2.6	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kegiatan UPPO tingkat Provinsi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP
												P.2.1.1. 1.2.2.6	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kegiatan UPPO tingkat Pusat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Dirjen PSP Kementan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
								P.2.1.1.1.3	Pengelolaan Lahan dan Air	P.2.1.1.1.3.1	Perlindungan Lahan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan	P.2.1.1.1.3.1.1	Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	P.2.1.1.1.3.1.1.1	Menyediakan data yang dibutuhkan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1.3.1.1.2	Koordinasi dengan dinas PU, BPN, Bappeda			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1.3.1.1.3	Pembuatan peta LP2B			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.1 .3.1.1.4	Penerbitan SK Bupati/Perbu p/Perda			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bupati/Walikota/ Gubernur
												P.2.1.1. 1.3.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor serta pembinaan pendayagunaan lahan	P.2.1.1.1 .3.1.2.1	Pertemuan dan pembahasan lintas sektor			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1 .3.1.2.2	Sosialisasi dan pembinaan pendayagunaan lahan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
										P.2.1.1.1.3.2	Pengelolaan Air dalam rangka menjamin ketersediaan air	P.2.1.1.1.3.2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	P.2.1.1.1.3.2.1.1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Kelompok Tani
														P.2.1.1.1.3.2.1.2	Perencanaan RJIT di Verifikasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1.3.2.1.3	Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1.1. 1.3.2.2	Pembangunan Embung	P.2.1.1.1 .3.2.2.1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan pembangunan rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Kelompok Tani
														P.2.1.1.1 .3.2.2.2	Perencanaan embung diVerifikasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1 .3.2.2.3	Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan /rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 1.3.2.3	Pembangunan Perpompaan (perpompaan besar dan perpompaan menengah)	P.2.1.1.1 .3.2.3.1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Kelompok Tani
														P.2.1.1.1 .3.2.3.2	Perencanaan perpompaan diVerifikasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1 .3.2.3.3	Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan /rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1.1.3.2.4	Pembangunan perpipaan	P.2.1.1.1.3.2.4.1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Kelompok Tani
														P.2.1.1.1.3.2.4.2	Perencanaan perpipaan diVerifikasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.1.3.2.4.3	Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan /rehabilitasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang PSP; Level 4: Bidang PSP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
						P.2.1.1.2	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	P.2.1.1.2.1	Penyediaan Benih TPH Bermutu dan bersertifikat	P.2.1.1.2.1.1	Perbanyak benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar	P.2.1.1.2.1.1.1	Penyediaan Benih Padi dan Palawija bersertifikat	P.2.1.1.2.1.1.1.1	Calon penerima bantuan membuat usulan rencana kebutuhan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan
														P.2.1.1.2.1.1.1.2	Identifikasi dan penetapan CPCL			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.1.1.3	Verifikasi usulan penerima bantuan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota
														P.2.1.1.2 .1.1.1.4	Pengusulan calon penerima kepada Dinas Pertanian Provinsi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.1.1.5	Penetapan penerima bantuan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Bidang TP Diperta KP Jawa Timur
														P.2.1.1.2 .1.1.1.6	Pengadaaan benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: JF Fungsional

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.1.1.7	Penyaluran benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Penyedia (Pihak Ketiga)
														P.2.1.1.2 .1.1.1.8	Pengawalan dan monitoring pelaksanaan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan benih padi dan palawija; Level 7: Bidang TP Diperta KP Jawa Timur

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1.2.1.1.2	Sertifikasi Benih Padi dan Palawija	P.2.1.1.2.1.1.2.1	Permohonan sertifikasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan/Perusahaan
														P.2.1.1.2.1.1.2.2	Pemeriksa berkas			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2.1.1.2.3	Pemeriksaan lapangan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: Diperta KP Jatim; Level 6:

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		UPT PSBTPH; Level 7; UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.1.2.4	Pemeriksaaan alat dan pengawasan panen/pengol ahan benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.1.2.5	Pengambilan contoh benih dan pengujian lab			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.1.2.6	Penerbitan sertifikat benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.1.2.7	Pemberian nomor seri dan legalitas label			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.1.2.8	Pengawasan pemasangan label			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		PSBTPH
										P.2.1. 1.2.1. 2	Perbanyak benih hortikultura berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar	P.2.1.1. 2.1.2.1	Penyediaan Benih Hortikultura bersertifikat	P.2.1.1.2 .1.2.1.1	Calon penerima bantuan membuat usulan rencana kebutuhan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.2.1.2	Identifikasi dan penetapan CPCL			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota
														P.2.1.1.2 .1.2.1.3	Verifikasi usulan penerima bantuan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.2.1.4	Pengusulan calon penerima kepada Dinas Pertanian Provinsi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota
														P.2.1.1.2 .1.2.1.5	Penetapan penerima bantuan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Bidang Hortikultura Diperta KP Jawa Timur

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.2.1.6	Pengadaaan benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: JF Pengadaan
														P.2.1.1.2 .1.2.1.7	Penyaluran benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Penyedia (Pihak Ketiga)

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.2.1.8	Pengawalan dan monitoring pelaksanaan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT Pengembangan Benih Hortikultura, Level 7: Bidang Hortikultura Diperta KP Jawa Timur
												P.2.1.1. 2.1.2.2	Sertifikasi Benih Hortikultura	P.2.1.1.2 .1.2.2.1	Permohonan sertifikasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan /Perusahaan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .1.2.2.2	Pemeriksaan berkas dan pemeriksaan pendahuluan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.2.2.3	Pemeriksaan lapangan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.2.2.4	Penerbitan sertifikat benih			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.2.2.5	Legalisasi label			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH
														P.2.1.1.2 .1.2.2.6	Pengawasan pemasangan label			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Diperta KP Jatim; Level 6: UPT PSBTPH; Level 7: UPT PSBTPH

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
								P.2.1.1.2.2	Pengembangan budidaya TPH	P.2.1.1.2.2.1	Meningkatkan produksi tanaman pangan strategis (padi, jagung dan kedelai)	P.2.1.1.2.2.1.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi Tanaman Sereal	P.2.1.1.2.2.1.1.1	Pengajuan proposal usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP; Level 7: Kelompok tani
														P.2.1.1.2.2.1.1.2	Identifikasi dan Verifikasi usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP; Level 7: Bidang TP
														P.2.1.1.2.2.1.1.3	Pengadaan bantuan benih, pupuk			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP; Level 7: JF Pengadaan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 2.2.1.2	Intensifikasi dan ekstensifikasi Tanaman aneka kacang dan umbi umbian	P.2.1.1.2 .2.1.2.1	Pengajuan proposal usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP; Level 7: Kelompok tani
														P.2.1.1.2 .2.1.2.2	Identifikasi dan Verifikasi usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP; Level 7: Bidang TP
														P.2.1.1.2 .2.1.2.3	Pengadaan bantuan benih, pupuk			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP; Level 7: JF Pengadaan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
										P.2.1. 1.2.2. 2	Meningkatka n produksi tanaman hortikultura strategis (cabe, bawang, bawang merah, mangga, jeruk dan manggis)	P.2.1.1. 2.2.2.1	Pengembangan kawasan Buah	P.2.1.1.2 .2.2.1.1	Pengajuan proposal usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Kelompok tani
														P.2.1.1.2 .2.2.1.2	Identifikasi dan Verifikasi usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Bidang Hortikultura

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .2.2.1.3	Pengadaan bantuan benih, pupuk			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: JF Fungsional
												P.2.1.1. 2.2.2.2	Pengembangan kawasan Sayur	P.2.1.1.2 .2.2.2.1	Pengajuan proposal usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Kelompok tani

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .2.2.2.2	Identifikasi dan Verifikasi usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Bidang Hortikultura
														P.2.1.1.2 .2.2.2.3	Pengadaan bantuan benih, pupuk			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: JF Fungsional

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 2.2.2.3	Pengembangan kawasan Obat	P.2.1.1.2 .2.2.3.1	Pengajuan proposal usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Kelompok tani
														P.2.1.1.2 .2.2.3.2	Identifikasi dan Verifikasi usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Bidang Hortikultura

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .2.2.3.3	Pengadaan bantuan benih, pupuk			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: JF Fungsional
												P.2.1.1. 2.2.2.4	Pengembangan kawasan Hias	P.2.1.1.2 .2.2.4.1	Pengajuan proposal usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Kelompok tani

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .2.2.4.2	Identifikasi dan Verifikasi usulan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: Bidang Hortikultura
														P.2.1.1.2 .2.2.4.3	Pengadaan bantuan benih, pupuk			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP Jatim; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura; Level 7: JF Fungsional
								P.2.1. 1.2.3	Perlindun gan Tanaman	P.2.1. 1.2.3. 1	Pengendalian OPT	P.2.1.1. 2.3.1.1	Penerapan PHT Skala Luas					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6:

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		UPT Proteksi TPH
												P.2.1.1. 2.3.1.2	Penerapan Manajemen Tanaman Sehat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH; Level 6: UPT Proteksi TPH
												P.2.1.1. 2.3.1.3	Gerakan pengendalian OPT					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH; Level 6: UPT Proteksi TPH

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 2.3.1.4	Sarana Klinik PHT					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH
										P.2.1. 1.2.3. 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	P.2.1.1. 2.3.2.1	Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)	P.2.1.1.2 .3.2.1.1	Pemilihan dan pengusulan CPCL			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7: POPT Kabupaten
														P.2.1.1.2 .3.2.1.2	Identifikasi masalah dan pemetaan lahan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7:

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		Kelompok Tani/Gapoktan
														P.2.1.1.2 .3.2.1.3	Penyusunan RUK			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .3.2.1.4	Pembuatan biopori dan sumur suntik/pantek			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan
														P.2.1.1.2 .3.2.1.5	Evaluasi hasil pelaksanaan PPDPI didampingi POPT			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7: Kelompok Tani/Gapoktan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .3.2.1.6	Pembinaan dan pengendalian			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7: UPT Proteksi TPH Diperta KP
														P.2.1.1.2 .3.2.1.7	Monitoring dan evaluasi			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH; Level 7: UPT Proteksi TPH Diperta KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1.2.3.2.2	Alokasi sarana penanganan DPI	P.2.1.1.2.3.2.2.1	Sumber dana bantuan pemerintah			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH, Level 7: Dirjen Tanaman Pangan Kementan
														P.2.1.1.2.3.2.2.2	Bantuan pengawalan, pendampingan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH, Level 7: Dirjen Tanaman Pangan Kementan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .3.2.2.3	Belanja bantuan pemerintah dalam bentuk belanja sarana biopori/sumur suntik			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: UPT Proteksi TPH; Level 5: UPT Proteksi TPH, Level 6: UPT Proteksi TPH, Level 7: Dirjen Tanaman Pangan Kementan
								P.2.1.1.2.4	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian	P.2.1.1.2.4.1	Pemberdayaan Penyuluh dan Pemberdayaan Petani	P.2.1.1.2.4.1.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian	P.2.1.1.2.4.1.1.1	Bimtek peningkatan Kapasitas Penyuluh			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT Pelatihan Pertanian, Level 6: UPT Pelatihan Pertanian; Level 7: UPT Pelatihan Pertanian

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .4.1.1.2	Sekolah Lapang Penyuluhan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT Pelatihan Pertanian, Level 6: UPT Pelatihan Pertanian; Level 7: UPT Pelatihan Pertanian
												P.2.1.1. 2.4.1.2	Penguatan kelembagaan korporasi petani	P.2.1.1.2 .4.1.2.1	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT Pelatihan Pertanian, Level 6: UPT Pelatihan Pertanian; Level 7: UPT Pelatihan Pertanian

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .4.1.2.2	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT Pelatihan Pertanian, Level 6: UPT Pelatihan Pertanian; Level 7: UPT Pelatihan Pertanian
														P.2.1.1.2 .4.1.2.3	Pelatihan Teknis Pertanian Agribisnis			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT Pelatihan Pertanian, Level 6: UPT Pelatihan Pertanian; Level 7: UPT Pelatihan Pertanian

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
										P.2.1.1.2.4.2	Ketersediaan pembiayaan/ permodalan untuk pengembangan usaha tani	P.2.1.1.2.4.2.1	Revitalisasi Pembiayaan	P.2.1.1.2.4.2.1.1	Fasilitasi dana bergulir (dagulir) sektor pertanian	P.2.1.1.2.4.2.1.1.1	Perjanjian kerja sama	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP bersama lembaga perbankan
																P.2.1.1.2.4.2.1.1.2	Pengajuan permohonan kredit	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Calon debitur

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																P.2.1.1.2.4. 2.1.1.3	Peneri maan permo honan kredit	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP bersama lembaga perbankan
																P.2.1.1.2.4. 2.1.1.4	Pempr osesan permo honan kredit	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP bersama lembaga perbankan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																P.2.1.1.2.4. 2.1.1.5	Peman faatan dana berguli r	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Calon debitur
																P.2.1.1.2.4. 2.1.1.6	Superv isi dan penyel esaian kredit berma salah	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP bersama lembaga perbankan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																P.2.1.1.2.4. 2.1.1.7	Pembi naan dan penga wasan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Sekda Provinsi Jawa Timur
																P.2.1.1.2.4. 2.1.1.8	Pelapo ran	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Sekretariat Diperta KP Jawa Timur

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.2 .4.2.1.2	Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) bidang pertanian	P.2.1.1.2. 4.2.1.2.1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Kelompok Tani
																P.2.1.1.2. 4.2.1.2.2	Verifikasi kebutuhan alsintan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP
																P.2.1.1.2. 4.2.1.2.3	Pengadaan barang alsintan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8:

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		JF Pengadaan
																P.2.1.1.2. 4.2.1.2.4	Distribusi alsintan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Penyedia (pihak ketiga)
														P.2.1.1.2 .4.2.1.3	Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan	P.2.1.1.2. 4.2.1.3.1	Membuat usulan terkait dengan kebutuhan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Kelompok Tani

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																P.2.1.1.2. 4.2.1.3.2	Verifikasi kebutuhan alsintan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP
																P.2.1.1.2. 4.2.1.3.3	Pengadaan barang alsintan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: JF Pengadaan
																P.2.1.1.2. 4.2.1.3.4	Distribusi alsintan	Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP; Level 8: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
																		Penyedia (pihak ketiga)
												P.2.1.1. 2.4.2.2	Asuransi Usaha Tani	P.2.1.1.2 .4.2.2.1	Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP
														P.2.1.1.2 .4.2.2.2	Pembinaan Kegiatan AUTP			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang PSP; Level 6: Bidang PSP; Level 7: Bidang PSP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
						P.2.1.1.3	Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	P.2.1.1.3.1	Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura	P.2.1.1.3.1.1	Fasilitasi Kegiatan Pascapanen dalam rangka menekan susut hasil (losses) tanaman pangan	P.2.1.1.3.1.1.1	Alokasi alat dan mesin pascapanen tanaman pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP
												P.2.1.1.3.1.1.2	Penataan Agribisnis melalui Cooperative Farming					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP
												P.2.1.1.3.1.1.3	SL GHP Komoditas Tanaman Pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
										P.2.1.1.3.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pascapanen dalam rangka menekan susut hasil (losses) tanaman hortikultura	P.2.1.1.3.1.2.1	Alokasi alat dan mesin pascapanen tanaman hortikultura					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura
												P.2.1.1.3.1.2.2	SL GHP Komoditas Tanaman Hortikultura					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura
								P.2.1.1.3.2	Pengolahan Hasil Pertanian	P.2.1.1.3.2.1	Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan	P.2.1.1.3.2.1.1	Pembinaan teknologi penerapan mutu pengolahan pangan yang baik					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 3.2.1.2	Alokasi alat dan mesin pengolahan tanaman pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang TP; Level 6: Bidang TP
										P.2.1. 1.3.2. 2	Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Hortikultura	P.2.1.1. 3.2.2.1	Pembinaan teknologi penerapan mutu pengolahan pangan yang baik					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura
												P.2.1.1. 3.2.2.2	Alokasi alat dan mesin pengolahan tanaman pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: Bidang Hortikultura; Level 6: Bidang Hortikultura

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
								P.2.1.1.3.3	Pemasaran Hasil Pertanian	P.2.1.1.3.3.1	Meningkatkan akses pasar dan investasi	P.2.1.1.3.3.1.1	Penginputan data kedalam Sistem Pelayanan Informasi Pasar					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH
												P.2.1.1.3.3.1.2	Sosialisasi dan temu usaha dalam rangka pengembangan produk potensi ekspor dan/atau substitusi impor dari hulu sampai hilir					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH
												P.2.1.1.3.3.1.3	Matchmaking potensi komoditas pertanian					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.1. 3.3.1.4	Fasilitasi alat dan sarana pasar tani					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH
												P.2.1.1. 3.3.1.5	Pameran Produk Pertanian Unggulan Provinsi Jawa Timur (produk segar dan olahan)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH
										P.2.1. 1.3.3. 2	Menjamin ketersediaan pasokan produk	P.2.1.1. 3.3.2.1	Penerapan Supply Chain Management	P.2.1.1.3 .3.2.1.1	Membudidayakan komoditas pertanian			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH; Level 7: Petani

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.3 .3.2.1.2	Menampung dan menjual kembali hasil pertanian dari petani			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH; Level 7: Tengkulak
														P.2.1.1.3 .3.2.1.3	Mengolah hasil pertanian (proses minimal atau pengolahan lebih lanjut)			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH; Level 7: Perusahaan besar/pengola han
														P.2.1.1.3 .3.2.1.4	Mendistribusi kan produk hasil pertanian			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH; Level 7: Distributor

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.1.3 .3.2.1.5	Menjual secara langsung produk hasil pertanian ke konsumen			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH; Level 7: Retailer
														P.2.1.1.3 .3.2.1.6	Pengawasan ketersediaan pangan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Diperta KP Jatim; Level 4: Diperta KP; Level 5: UPT PATPH; Level 6: UPT PATPH; Level 7: Bidang KP
				P.2.1.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	P.2.1.2.1	Peningkatan pola konsumsi pangan yang sehat (B2SA)	P.2.1.2.1.1	Promosi dan kampanye pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	P.2.1.2.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang	P.2.1.2.1.1.1.1	Pertemuan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 1.1.1.2	Pembinaan Kegiatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
										P.2.1. 2.1.1. 2	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	P.2.1.2. 1.1.2.1	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 1.1.2.2	Analisa Pola Konsumsi Pangan Berbasis Skor PPH					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 1.1.2.3	Bimtek Analisa Konsumsi Pangan Berbasis Skor Pola Pangan Harapan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
								P.2.1. 2.1.2	Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Pangan Lokal	P.2.1. 2.1.2. 1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	P.2.1.2. 1.2.1.1	Pameran Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 1.2.1.2	Pameran Pangan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 1.2.1.3	Kampanye Diversifikasi Pangan Provinsi Jawa Timur					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 1.2.1.4	Promosi Diversifikasi Pangan Lokal					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
										P.2.1. 2.1.2. 2	Pemberdayaa n Industri Pangan Lokal	P.2.1.2. 1.2.2.1	Fasilitasi Industri Pangan Lokal					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 1.2.2.2	Pembinaan Kelompok Usaha Olahan Pangan lokal					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
								P.2.1. 2.1.3	Pemanfaat an Lahan Pekaranga n	P.2.1. 2.1.3. 1	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	P.2.1.2. 1.3.1.1	Pertemuan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 1.3.1.2	Pembinaan Kegiatan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
										P.2.1.2.1.3.2	Fasilitasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari)	P.2.1.2.1.3.2.1	Alokasi Hibah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2.1.3.2.2	Evaluasi dan Monitoring Alokasi Hibah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari)					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
						P.2.1.2.2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	P.2.1.2.2.1	Distribusi Pangan	P.2.1.2.2.1.1	Pemantauan Distribusi Pangan	P.2.1.2.2.1.1.1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 2.1.1.2	Pemantauan sistem distribusi di pasar					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
										P.2.1. 2.2.1. 2	Pelaksanaan Distribusi Pangan	P.2.1.2. 2.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Distribusi Pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 2.1.2.2	Gelar Pasar Murah dan berkualitas					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
								P.2.1.2.2.2	Pemantauan Harga Pangan	P.2.1.2.2.2.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan	P.2.1.2.2.2.1.1	Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2.2.2.1.2	Pemantauan Harga Pangan Tingkat Grosir					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2.2.2.1.3	Pemantauan Harga Pangan Tingkat Konsumen					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 2.2.1.4	Koordinasi Kegiatan Pemantauan Harga Pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
										P.2.1. 2.2.2. 2	Pemantauan Stok dan Pasokan Pangan	P.2.1.2. 2.2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok dan Pasokan Pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 2.2.2.2	Pemantauan Pasokan di sentra produksi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
						P.2.1.2.3	Keterse diaan dan Cadang an Pangan Masyar akat	P.2.1.2.3.1	Pengemba ngan Cadangan Pangan Pemerinta h dan Masyarak at	P.2.1.2.3.1.1	Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dan Masyarakat	P.2.1.2.3.1.1.1	Fasilitasi Kelompok Lumbung Pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2.3.1.1.2	Apresiasi Lumbung Pangan Masyarakat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2.3.1.1.3	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
										P.2.1. 2.3.1. 2	Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi dan Masyarakat	P.2.1.2. 3.1.2.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 3.1.2.2	Analisa Ketersediaan Pangan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 3.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
								P.2.1.2.3.2	Penangan an Daerah Rawan Pangan	P.2.1.2.3.2.1	Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	P.2.1.2.3.2.1.1	Sosialisasi Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota abupaten/Kota					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2.3.2.1.2	Penyusunan Peta FSVA					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
										P.2.1.2.3.2.2	Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi	P.2.1.2.3.2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 3.2.2.2	Apresiasi Sistem kewaspadaan Pangan Gizi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
												P.2.1.2. 3.2.2.3	Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah kab dalam 1 daerah provinsi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: Bidang KP; Level 4: Bidang KP; Level 5: Bidang KP; Level 6: Bidang KP
						P.2.1.2. 4	Penerapan Jamina n Mutu dan Keaman an Pangan	P.2.1.2.4.1	Peningkat an sertifikasi dan pendaftar an Pangan Segar Asal Tumbuha n (PSAT), Rekomend asi dan pengawas an	P.2.1.2.4.1.1	Pengawasan Pre dan Post Market PSAT	P.2.1.2.4.1.1.1	Penetapan lokasi pengawasan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2.4.1.1.2	Pelaksanaan kegiatan pengawasan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2.4.1.1.3	Pelaporan hasil pengawasan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP
										P.2.1.2.4.1.2	Pemberian Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Ijin penggunaan tanda / label SNI dan atau regulasi teknis produk PSAT	P.2.1.2.4.1.2.1	Sertifikasi Prima 2 dan Prima 3	P.2.1.2.4.1.2.1.1	Pengajuan permohonan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: Pemohon

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.2.4 .1.2.1.2	Audit kecukupan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.1.3	Penunjukan tim auditor			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.1.4	Pelaksanaan audit lapang			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.2.4 .1.2.1.5	Penyampaian laporan hasil audit			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.1.6	Pembahasan hasil audit oleh Komisi Teknis			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.1.7	Rekomendasi sertifikat			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.2.4 .1.2.1.8	Penyerahan sertifikat			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.1.2.2	Registrasi Rumah Kemas	P.2.1.2.4 .1.2.2.1	Pengajuan permohonan			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: Pemohon
														P.2.1.2.4 .1.2.2.2	Pemeriksaan dan penilaian kecukupan dokumen			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.2.4 .1.2.2.3	Penunjukan tim auditor			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.2.4	Penilaian lapang			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.2.5	Rapat Komisi Teknis			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
														P.2.1.2.4 .1.2.2.6	Rekomendasi sertifikat			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
														P.2.1.2.4 .1.2.2.7	Penyerahan sertifikat			Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP; Level 7: UPT PSHP
										P.2.1. 2.4.1. 3	Pemberian rekomendasi ekspor	P.2.1.2. 4.1.3.1	Pelaku usaha mendaftarkan produknya					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: Pelaku usaha

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 4.1.3.2	Verifikasi dokumen					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.1.3.3	Pengambilan contoh					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.1.3.4	Peninjauan hasil laboratorium					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 4.1.3.5	Penerbitan HC					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: UPT PSHP
										P.2.1. 2.4.1. 4	Registrasi PSAT	P.2.1.2. 4.1.4.1	Pengajuan dan penyerahan dokumen registrasi					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: Pemohon
												P.2.1.2. 4.1.4.2	Verifikasi dokumen					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 4.1.4.3	Audit					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.1.4.4	Penilaian lapang					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.1.4.5	Pengambilan contoh					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 4.1.4.6	Persetujuan pendaftaran					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP
								P.2.1. 2.4.2	Peningkat an kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultu ra	P.2.1. 2.4.2. 1	Fasilitasi penerapan jaminan mutu organik	P.2.1.2. 4.2.1.1	Permohonan sertifikasi organik					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP; Level 6: Pemohon
												P.2.1.2. 4.2.1.2	Kaji ulang permohonan					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 4.2.1.3	Penugasan inspektor dan PPC					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.2.1.4	Inspeksi dan pengambilan contoh					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP
												P.2.1.2. 4.2.1.5	Tindak lanjut inspeksi dalam pengujian laboratorium					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Level 8		Pelaksana
												P.2.1.2. 4.2.1.6	Penyerahan sertifikat					Level 0: Pemprov Jatim; Level 1: Pemprov Jatim; Level 2: Diperta KP Jatim; Level 3: UPT PSHP; Level 4: UPT PSHP; Level 5: UPT PSHP, Level 6: UPT PSHP